

# RENCANA STRATEGIS

## RSJD PROVINSI JAMBI



2021-2026

📍 Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar  
Alam Barajo - Kota Jambi

🌐 [www.rsj.pemprov.go.id](http://www.rsj.pemprov.go.id)

✉ [rsjd.jambi@yahoo.com](mailto:rsjd.jambi@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT dan atas berkah dan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen penting yang berperan sebagai panduan dalam menentukan arah program dan kegiatan di RSJD Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan.

Kami berharap dokumen Renstra RSJD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan perlindungan serta jalan yang terang kepada kita semua dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah ridho Allah SWT. Aamiin.

Jambi, 31 Oktober 2021

Direktur,



**dr. M. FIRMANSYAH**

NIP 19650728 200012 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSJD PROVINSI JAMBI.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSJD Provinsi Jambi .....	8
2.2 Sumber Daya RSJD Provinsi Jambi .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan RSJD Provinsi Jambi .....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSJD Provinsi Jambi .....	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS RSJD PROVINSI JAMBI.....	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSJD .....	56
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis...	64
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJD Provinsi Jambi .....	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	78
BAB VIII PENUTUP .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah RSJD Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja dan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan dalam kurun waktu lima tahun yang akan dibahas dalam rangkaian Musrenbang. Pembiayaan program kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis berasal dari Sumber Dana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), anggaran BLUD.

Pengembangan RSJD Provinsi Jambi ke depan memerlukan langkah konkret dengan membuat perencanaan strategis yang matang dan komprehensif serta dapat menjangkau dan memperkirakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap pencapaian substansi sesuai tugas dan fungsi, dengan mendasarkan pada kondisi masa kini dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang. Rencana yang berisikan langkah-langkah selama 5 (lima) tahun ke depan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang antara lain berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan juga dalam rencana tiap tahunnya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sehingga menjadi pedoman dan acuan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi merupakan keberlanjutan dan penjabaran lebih lanjut dari visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang Program dan kegiatan didalamnya sesuai dengan program dan kegiatan RSJD Provinsi Jambi.

Kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting sehingga tuntutan akan pelayanan kesehatan yang optimal oleh masyarakat sangat tinggi. Menyikapi hal ini, RSJD Provinsi Jambi berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya, layanan yang sudah diberikan selama ini khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), peningkatan mutu tersebut berupa peningkatan dari segi tenaga, sarana dan prasarana maupun fasilitas yang ada.

Rencana strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan hasil penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSJD Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan. Visi dan Misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Selain itu, Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 juga disusun sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional” dengan jargon “JAMBI MANTAP” yang selanjutnya dijabarkan melalui misi-misi:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini mencakup perencanaan program-program kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan klasifikasi RS yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang RS dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Selanjutnya program-program tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan, dan diaplikasikan pada saat penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada sasaran program RSJD Provinsi Jambi. Rencana kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi akan dilaksanakan tiap tahunnya melalui Dana APBD Provinsi Jambi yang tertuang dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSJD Provinsi Jambi.

Selain dari itu Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memiliki hubungan vertikal dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi serta juga memiliki hubungan horizontal dengan Perangkat Daerah lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi ini adalah landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Landasan operasional meliputi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
33. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
34. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026
36. Permendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra RSJD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang Kesehatan; khususnya yang terkait dengan pelayanan dan kesehatan jiwa dan NAPZA, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama yang kuat dan konsisten serta menjamin keselarasan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Kesehatan Provinsi Jambi secara berkesinambungan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun Penyusunan Renstra RSJD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk 5 tahun ke depan, tahun 2021-2026.
2. Menjabarkan program dan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh RSJD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026.
3. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan RSJD Provinsi Jambi.
4. Menjadi pedoman dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran periode 2021-2026.
5. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan dan evaluasi kinerja RSJD Provinsi Jambi periode 2021-2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSJD PROVINSI JAMBI**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSJD Provinsi Jambi

2.2 Sumber Daya RSJD Provinsi Jambi

2.3 Kinerja Pelayanan RSJD Provinsi Jambi

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan RSJD Provinsi  
Jambi

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
INDIKATIF**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RSJD PROVINSI JAMBI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSJD Provinsi Jambi**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi RSJD Provinsi Jambi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja RSJD dibentuklah RSJD Provinsi Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus di bawah Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. RSJD Provinsi Jambi memiliki tugas yang bersifat khusus untuk memberikan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA serta pelayanan kesehatan lainnya secara professional.

RSJD Provinsi Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya RSJD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.
4. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa.
5. Pelayanan medis.
6. Pelayanan penunjang medis dan non medis.
7. Pelayanan keperawatan.
8. Pelayanan rujukan.
9. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
11. Pengelolaan keuangan dan akuntansi.

12. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor 390 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berlaku hingga Desember 2021. RSJD Provinsi Jambi telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Unsur-unsur Organisasi RSJD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Jiwa, Umum, dan Ketergantungan Napza
  - b. Seksi Penunjang Medik
3. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi
  - b. Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
4. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
  - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
5. Unit-unit non struktural terdiri dari:
  - a. Satuan Pemeriksaan Internal
  - b. Komite
  - c. Instalasi
  - d. Kelompok Staf Medis
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari unsur-unsur organisasi tersebut di atas, maka tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat eselonnya adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Sebagai pimpinan organisasi, Direktur mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD.
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD.
- c. Menandatangani surat perintah membayar.
- d. Mengelola utang dan piutang RSJD yang menjadi tanggungjawabnya.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD yang dipimpinnya.
- f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.
- g. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan.
- h. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan.
- i. Melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- j. Menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

- a. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik di bidang sumber daya pelayanan medis dan penunjang medik, pelayanan administrasi serta mutu pelayanan medis dan penunjang medik.
- d. Bidang Pelayanan dan Penunjang medik mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis
  2. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan medis
  3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien
  4. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik
  5. Penyiapan bahan pelayanan administrasi di bidang mutu pelayanan medis dan penunjang medik
  6. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

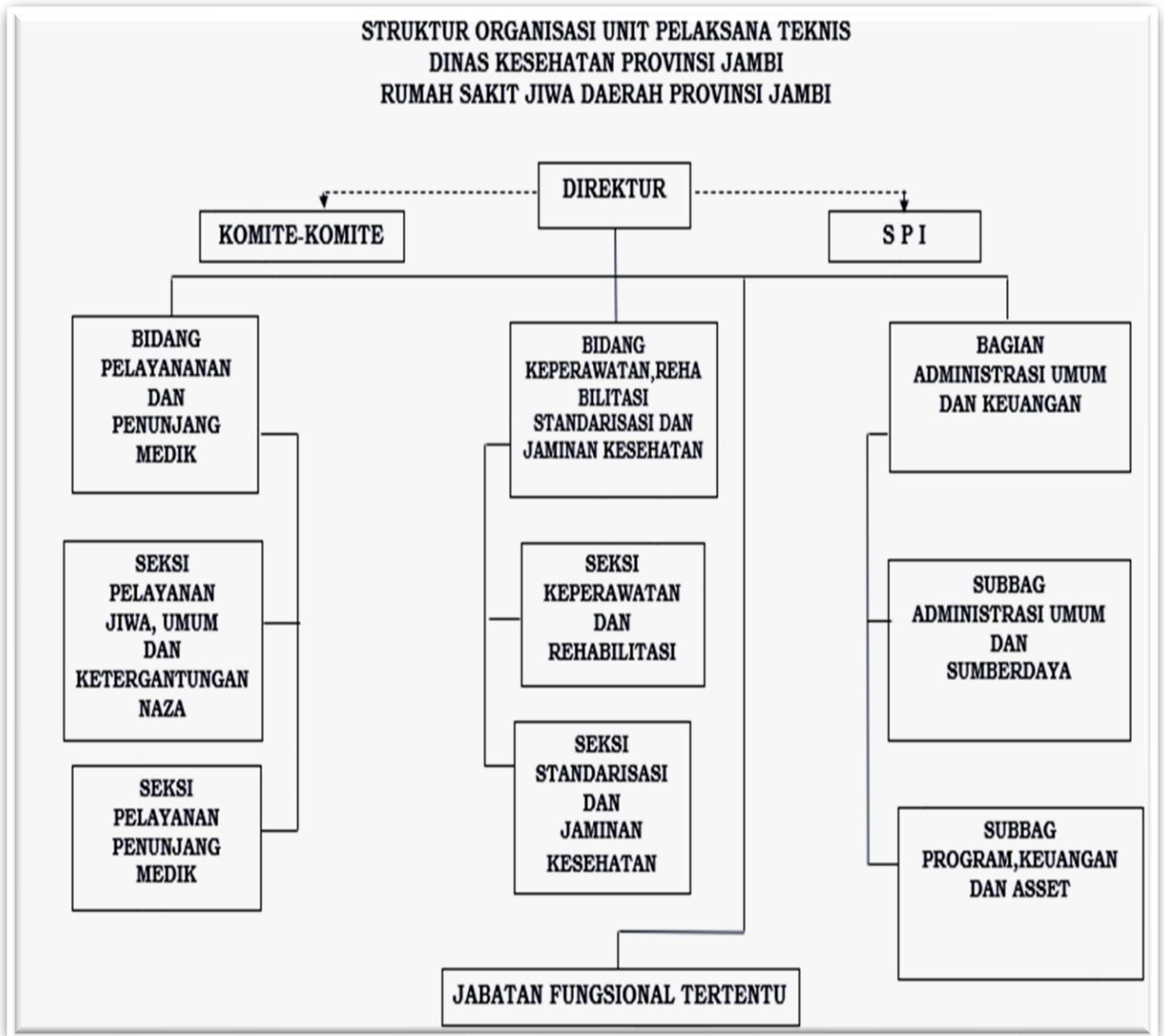
- e. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari 2 seksi, yaitu:
1. Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan Napza. Seksi ini mempunyai fungsi:
    - (1) Perumusan pengembangan pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza.
    - (2) Perumusan kebutuhan sarana prasarana pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza.
    - (3) Pengendalian pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza.
    - (4) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza.
    - (5) Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik serta pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Penunjang Medik. Seksi ini mempunyai fungsi:
    - (1) Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik.
    - (2) Penyusunan dan pengendalian sistem dan prosedur pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik sesuai dengan standar
    - (3) Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
    - a. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi di Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan.
    - b. Bidang ini mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan Kesehatan.
  2. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan Kesehatan.
  3. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan dari 2 seksi, yaitu:
1. Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan rehabilitasi serta pelayanan administrasi di Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi. Seksi ini mempunyai fungsi :
    - a. Pengembangan pelayanan keperawatan dan rehabilitasi
    - b. Pengelolaan sumber daya, sarana prasarana pelayanan keperawatan dan rehabilitasi
    - c. Pengendalian pelayanan keperawatan dan rehabilitasi
    - d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan keperawatan dan pelayanan rehabilitasi
    - e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan. Seksi ini mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan standarisasi pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan
    - c. Penyusunan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi sistem dan prosedur pelayanan RSJD sesuai dengan standar
    - d. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan standarisasi
    - e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
  - a. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bagian administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset.
  - b. Fungsi Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah :
    1. penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset RSJD.
    2. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan aset.
    3. pelaksanaan pelayanan administrasi di bagian umum dan keuangan.
    4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - c. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari 2 sub bagian, yaitu:
    1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia. Sub bagian ini mempunyai fungsi :
      - 1) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia.
      - 2) Pelaksanaan pelayanan urusan sarana dan prasarana non medik.
      - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset RSJD Provinsi Jambi. Sub Bagian ini mempunyai fungsi:
      - 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran RSJD
      - 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan RSJD
      - 3) pelaksanaan pengelola aset RSJD
      - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Unit-unit non struktural terdiri dari:
  - a. Satuan Pemeriksaan Internal
  - b. Komite

- c. Instalasi
  - d. Kelompok Staf Medis
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2.1.2. Struktur Organisasi RSJD Provinsi Jambi**



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD RSJD Provinsi Jambi**

## 2.2. Sumber Daya RSJD Provinsi Jambi

### 2.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana RSJD Provinsi Jambi terdata seperti di bawah ini.

**Tabel 2.1 Aset Bangunan pada RSJD Provinsi Jambi**

No	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi
1.	Ruang Administrasi & Manajemen	604	2 lantai/baik
2.	Gedung Instalasi Gawat darurat	380	1 lantai/baik
3.	Gedung Instalasi Rawat Jalan I : a. Poli Jiwa anak & remaja b. Poli Jiwa Dewasa c. Poli Jiwa Psikogeatri (Lansia) d. Poli Napza e. Poli Gigi f. Ruang Farmasi g. Ruang Rekam medik h. Ruang Laboratorium i. Ruang PKRS j. Ruang Admision k. Ruang JKN Centre l. Ruang Pengaduan masyarakat	550	Baik
4.	Instalasi Rawat Jalan II : ( 2 Lantai ) a. Poli Syaraf b. Poli Anak c. Poli Kulit & Kelamin d. Poli Penyakit dalam e. Poli Akupuntur f. Poli Rehab medik g. Ruang fisioterapi h. Ruang Komite Medik i. Ruang Psikometri	757	Baik
5.	Gedung Radiologi	176	Baik

6.	Gedung Dapur Gizi	861	Baik
7.	Instalasi Rawat Inap :		
	a. Ruang UPIP / ALFA	408	Baik
	b. Ruang Epsilon	560	Baik
	c. Ruang Beta	380	Baik
	d. Ruang Gama	361	Baik
	e. Ruang Teta	408	Baik
	f. Ruang Delta	380	Baik
	g. Ruang Srikandi	468	Baik
	h. Ruang Yudistira	336	Baik
	i. Ruang Arjuna	336	Baik
	j. Ruang Shinta	275	Baik
	k. Ruang Sigma	378	Baik
	l. Ruang Pega	275	Baik
	m. Ruang Arimbi	380	Baik
	n. Ruang Omega ( Geriatri )	384	Baik
	o. Ruang Zetta	435	Baik
	p. Ruang Lambda	2400	Baik
8.	Gedung Gudang Central	285	Baik
9.	Perpustakaan	88	Baik
10.	Gedung Laundry	20	Baik
11.	Inastalasi Pengolahan Air Limbah	80	Baik
12.	Tempat Penyimpan Sementara Limbah B3	180	Baik
13.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	282	Baik
14.	Gedung IPRS(Workshop)	300	Baik
15.	Aula (ruang Pertemuan)	350	Baik
16.	Ruang Diklat (seminar, komkordik, ULP )	287	Baik
17.	Tempat Ibadah (Mushola)	236	2 unit/Baik
18.	Rumah Dinas Dokter Spesialis	70	5 unit/Baik
19.	Rumah Dinas Perawat	70	4 Unit/Baik
20.	Rumah Dinas Perawat	36	5 Unit/Baik
21.	Asrama Mahasiswa	25	Baik

22.	Pos Satpam	9	Baik
23.	Kantin	66	Baik
24.	Hall Badminton	209	Baik( <i>proses Penghapusan</i> )
25.	Lapangan Tenis	66	Baik
26.	Driver	24	Baik
27.	Ruang Generator/Genset		Baik
28.	Tempat Parkir Roda Dua		Baik
29.	Tempat Penitipan Anak		Baik
30.	Garasi Kendaraan Roda 4		Baik
31.	Gudang Aset		Baik

Sumber : Data Aset RSJD Provinsi Jambi, 2021

**Tabel 2.2 Sarana Transportasi pada RSJD Provinsi Jambi**

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 2	22 Unit	Baik
2.	Kendaraan Operasional Pejabat Struktural Roda 4	4 Unit	Baik
3.	Kendaraan Operasional Dokter Spesialis Roda 4	5 Unit	Baik
4.	Kendaraan Operasional pelayanan roda 4	3 Unit	Baik
5.	Ambulans Roda 4	3 Unit	Baik
6.	Ambulans Roda 4 (Lama)	2 Unit	Rusak Berat

Sumber : Data Aset RSJD Provinsi Jambi, 2021

**Tabel 2.3 Peralatan Medik pada RSJD Provinsi Jambi**

No	Nama Peralatan	Jumlah	Kondisi
<b>1.</b>	<b>INSTALASI GAWAT DARURAT</b>		
1.	Syringe Pump	1 Set	Baik
2.	EKG	1 Set	Baik
3.	DC Shock	2 Set	Baik
4.	BHD Set	2 set	Baik
5.	Pinset Anatomi	1 buah	Baik
6.	Arteri Klem Bengkok Kecil	1 buah	Rusak
7.	Pinset Anatomi	1 buah	Baik
8.	Arteri Klem Bengkok Kecil	1 buah	Baik

9.	Nald Foulder	1 buah	Baik
10.	Allis Tissue And Organ Hol Fep 15 cm	2 buah	Baik
11.	Nald Folder 20 cm	1 buah	Baik
12.	Klem Arteri 14 cm	1 buah	Baik
13.	Bengkok sedang	3 buah	Baik
14.	Bengkok Kecil	6 buah	Baik
15.	Bak Instrumen besar	1 buah	Baik
16.	Bak Instrumen Sedang	2 buah	Baik
17.	Bak Instrumen Kecil	3 buah	Baik
18.	Stetoscop	2 buah	Baik
19.	Ever Light black	2 buah	Baik
20.	Operation Lamp	1 buah	Baik
21.	Autoclave	1 buah	Baik
22.	Standar Infuse	3 buah	2 Baik,1 Rusak
23.	Meja troli Kecil	4 buah	Baik
24.	Pen Light	1 buah	Baik
25.	Neck Cholar	2 buah	Baik
26.	Tabung O2 besar	5 buah	Baik
27.	Tabung O2 Kecil	2 buah	Baik
28.	Troli O2 Besar	3 buah	Baik
29.	Skope Strecher (brankard)	2 buah	Baik
30.	Regulator O2	3 buah	1Baik, 2 Rusak
31.	THT Set	1 buah	Baik
32.	Suction+Nebulizer	3 buah	Baik
33.	Nebulizer	1 buah	Baik
34.	Sterilisator Rebus Sedang	1 buah	Baik
35.	Sterisilisator Rebus Kecil	2 buah	Rusak
36.	Ambu Bag	3 buah	1 Rusak, 2 Baik
<b>2.</b>	<b>INSTALASI RAWAT JALAN :</b>		
<b>A.</b>	<b><u>Poliklinik Jiwa</u></b>		
1.	Stetoskop	1 buah	Baik

2.	Timbangan Tegak	1 buah	Baik
3.	Nerbeken	1 buah	Baik
4.	Bak Injeksi Kecil	1 buah	Baik
5.	Rak/Brankar Injeksi	1 buah	Baik
<b>B. Poliklinik Saraf</b>			
1.	Tempat Tidur Pasien	1 buah	Baik
2.	Meja Pasien	1 buah	Baik
3.	Tensi Air raksa	1 buah	Baik
4.	Kursi roda pasien	1 buah	Baik
5.	Timbangan dewasa Tegak	2 buah	Baik
6.	X-Ray viewer single	1 buah	Baik
7.	Tensi air raksa	1 buah	Baik
8.	Stetoskop	2 buah	Baik
9.	Tabung oxigen kecil	1 buah	Baik
10.	Korentang	1 buah	Baik
11.	Tempat Korentang	1 buah	Baik
12.	Tensi Tegak	1 buah	Baik
<b>3. ELEKTROMEDIK :</b>			
1.	EEG	1 Unit	Rusak
2.	EMG Cadwil	1 Unit	Baik
<b>4. RUANG RAWAT INAP :</b>			
1.	Tempat Tidur Pasien	361 buah	Baik
2.	Lemari pakaian pasien	15 buah	Baik
3.	CCTV (PICU,IGD,Zeta,Lamda)	3 Set	Baik
4.	Kamera CCTV (Indoor Camera)	60 buah	Baik
5.	Tensimeter	13 buah	2 Rusak
6.	Stetoskop	13 buah	Baik
7.	Standard Infus	13 buah	Baik
8.	Tabung Oksigen	6 buah	Baik
9.	Kursi Roda	12 buah	Baik
10.	Meja Instrumen	6 buah	Baik
11.	Timbangan BB	13 buah	4 Rusak

12.	Pinset Anatomi	7 buah	Baik
13.	Pinset Bedah	5 buah	Baik
14.	Tali Fiksasi	40 buah	Baik
<b>5.</b>	<b>INSTALASI RADIOLOGI :</b>		
1.	USG	1 unit	Baik
2.	Screen Green	3 unit	Baik
3.	Grid Lysolm	3 unit	Baik
4.	Masker (alat rontgen)	1 unit	Baik
5.	Hanger (alat rontgen)	1 unit	Baik
6.	TLD (alat rontgen)	6 unit	Baik
7.	Apron Radiologi	2 unit	Baik
8.	Lampu Wiwieng Box	1 Box	Baik
9.	General X-Ray 500 mA (Hitachi)	1 unit	Baik
10.	Patient Trolley	1 unit	Baik
11.	Automatic Film Processing	1 unit	Baik
12.	Panoramic Merk Villa	1 Unit	Baik
<b>6.</b>	<b>INSTALASI LABORATORIUM :</b>		
1.	Urine analyzer	2 unit	Baik
2.	Automatic Haematology Analyzer	1 unit	Baik
3.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	2 unit	Baik
4.	ELISA Automatic/Semiautomatic Analyzer	1 unit	Baik
5.	Drug Monitor (Urine analisis)	1 unit	Baik
6.	Centrifuge	1 unit	Baik
7.	Autoclave	1 unit	Baik
8.	Microscope Electric (Binocular)	3 unit	Baik
9.	Water Distilator	1 unit	Baik
10.	Spectrophotometer	1 unit	Baik
11.	Hematology Analyzer	1 unit	Baik
12.	Microscope/Manual Monocular	1 unit	Kurang
13.	Glucose Meter	1 unit	Baik

<b>7. RUANG ISOLASI JIWA :</b>		
1. APD untuk Petugas Kesehatan : Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung Tangan/Kaos Kaki, Disposable, Kaca Mata googles, Tutup Wajah, Apron) Peralatan untuk Pasien :	1.Set	Baik
2. Termometer	1 unit	Baik
3. Stetoskop	1 unit	Baik
4. Sphygmomanometer	1 unit	Baik
5. Tourniquet	1 set	Baik
6. Intra Vena Set	1 set	Baik
7. Pole	1 set	Baik
8. Basin	1 unit	Baik
9. Mobile Screen	1 set	Baik
10. Bedpain	1 set	Baik
11. Bed Linen	1 set	Baik
<b>8. INSTALASI REHABILITASI MEDIK</b>		
1. Kursi Exercise	1 unit	Baik
2. Interferencial Therapy (vacum)	3 unit	Baik
3. Micro Wave Diatermy	1 unit	Baik
4. Short Wave Diatermy	1 unit	Baik
5. Faradic Therapy	1 unit	Baik
6. Ultrasound Therapy	2 unit	Baik
7. Lazer Therapy	1 unit	Baik
8. Traction Unit	2 unit	Rusak
9. Upper Limb Therapy	1 unit	Baik
10. Lower Limb Therapy (Wheel)	1 unit	Baik
11. Pararel Bar	2 unit	Baik
12. Static Cycle	1 unit	Baik
13. Treadmill (Power ECG)	1 unit	Baik
14. Kursi Roda Pasien	2 unit	Baik
15. Tarction Unit	1 unit	Rusak

16.	Ultra Short Wave Diathermy	1 unit	Baik
17.	Infra Red Lamp Therapy	2 unit	Baik
18.	Examination Table	1 unit	Baik
19.	Exerciser	1 unit	Baik
20.	Eletric Stimulator	3 unit	Baik
21.	Ultrasound Therapy	3 unit	Baik
22.	Quadiceps Table	1 unit	Baik
23.	Tensi Tegak	1 unit	Baik
<b>9.</b>	<b>INSTALASI REHABILITASI MENTAL</b>		
<b>A.</b>	<b><u>Alat Pertukangan</u></b>		
1.	Mesin Bubut	1 Buah	Baik
2.	Sugu Listrik	2 Buah	Baik
3.	Alat Spong	1 Buah	Baik
4.	Gergaji	8 Buah	Baik
<b>B.</b>	<b><u>Alat Pertanian</u></b>		
1.	Cangkul	8 Buah	Baik
2.	Tajak	10 Buah	Baik
3.	Arit	1 Buah	Baik
4.	Parang Panjang	5 Buah	Baik
5.	Cangkul Kecil	1 Buah	Baik
6.	Lori	-	-
<b>C.</b>	<b><u>Alat Tata Boga</u></b>		
1.	Panci Kukusan Besar	1 Buah	Baik
2.	Kuali Besar	1 Buah	Baik
3.	Kuali Sedang	3 Buah	Baik
4.	Kuali kecil	1 Buah	Baik
5.	Panci sedang	1 Buah	Baik
<b>10.</b>	<b>RUANG SEKLUSI UPIP (ALPA)</b>		
1.	CCTV	1 buah	Rusak
2.	Kamera CCTV	22 buah	Rusak
3.	Tempat tidur pasien	14 buah	Baik
4.	Tensimeter	1 buah	Baik

5.	Stetoskop	1 buah	Baik
6.	Standard Infus	1 buah	Baik
7.	Tabung Oksigen	1 buah	Baik
8.	Kursi Roda	1 buah	Baik
9.	Meja Instrumen	1 buah	Baik
10.	Timbangan BB	1 buah	Baik
11.	Pinset Anatomi	1 buah	Baik
12.	Pinset Cirurgi	2 buah	Baik
13.	Tali Fiksasi	28 buah	Baik
<b>11.</b>	<b>INSTRUMENT PSIKOMETRI</b>		
<b>A.</b>	<b><u>Instrumen Kecerdasan</u></b>		
	Sederhana:		
1.	Standar Progressive Matrice	29 buku	Baik
2.	Colour Progressive Matrice,	4 buku	Baik
3.	Tes Intelegensia Umum	CFIT=7	Baik
4.	Canggih:	CFIT=4	Rusak
5.	WB	1 set	Baik
6.	Binet	1 set	Baik
7.	WAIS	1 set	Baik
<b>B.</b>	<b><u>Instrument Kepribadian</u></b>		
	Sederhana:		
1.	Grafis		
2.	Wartegg	2 Rim	
	Sedang		
3.	EPPS		
4.	16 PF	36 buku	
5.	SSCT	20 buku	
6.	Papikostik	-	
7.	DISC	-	
	Canggih:		
8.	Rosarchach,	100 lbr	
9.	CAT	1 Set	

10.	TAT	! set	
11.	MMPI	1 set	

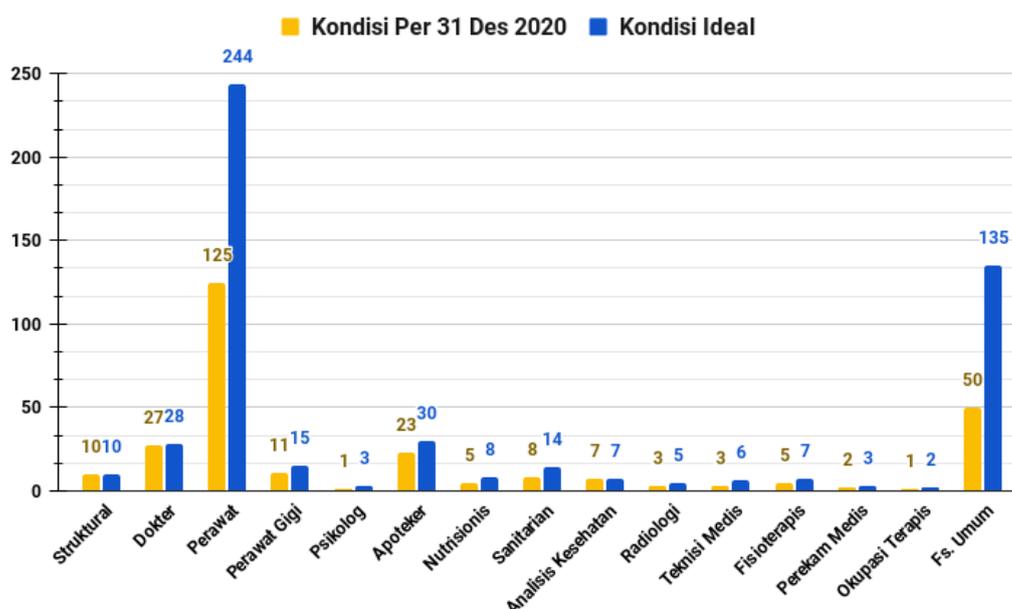
Sumber : Data Aset RSJD Provinsi Jambi, 2021

### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Kondisi SDM RSJD Provinsi Jambi berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 466 orang yang terdiri dari 279 orang PNS dan pegawai honor 187 Orang .

Profil Kepegawaian RSJD Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut:

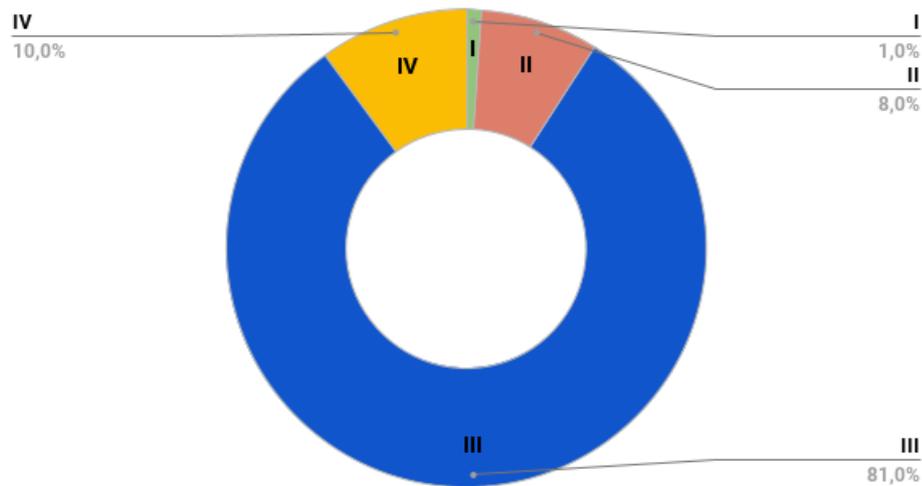
**Gambar 2.1 Profil Kepegawaian RSJD Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu pada Tahun 2020**



Grafik diatas dapat disimpulkan pegawai RSJD Provinsi Jambi berdasarkan kondisi ideal masih kurang tenaga sesuai dengan data kondisi Per 31 Des 2020

**Gambar 2.2 Profil Kepegawaian RSJD Provinsi Jambi Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020**

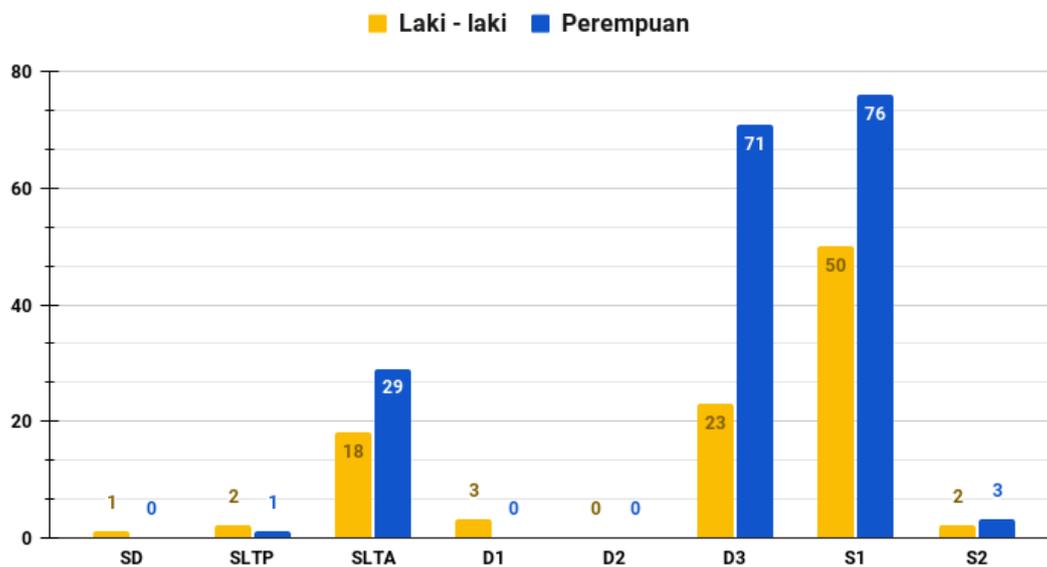
### PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di RSJD Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

**Gambar 2.5 Profil Kepegawaian RSJD Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

### PROFIL PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Sumber daya manusia RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi lebih banyak oleh D3 dan Sarjana S1 terkait dengan jabatan fungsional dokter dan perawat .

### **2.3. Kinerja Pelayanan RSJD Provinsi Jambi**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RSJD Provinsi Jambi	Target NSP K( Normal standar prosedur kriteria)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	-	100 %	-	97 %	97 %	98 %	100 %	96 %	96 %	70 %	49 %	41 %	22 %	98,9 %	72,16 %	50 %	41 %	23 %
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	98 %	-	98 %	95 %	97 %	96 %	98 %	101 %	19 %	99 %	11 %	7 %	103 %	20 %	103 %	12 %	7,14 %
3	Persentase PNS yang disiplin	-	98 %	-	98 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	96 %	90 %	83 %	79 %	102 %	96 %	90,9 %	83,8 %	79,79 %

4	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	100 %	-	90 %	95 %	90 %	95 %	96 %	385 %	185 %	136 %	215 %	107 %	42 7 %	19 4,7 %	15 1 %	22 6,3 %	11 1,4 %
5	Persentase ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien rsj dan Bahan Medis Habis Pakai	-	80 %	-	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	88 %	199 %	228 %	209 %	228 %	11 0 %	24 8,7 5 %	28 5 %	26 1,2 5 %	28 5 %
6	Persentase kab/kota yang dilayani pelayanan jiwa	-	71,83 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	46 %	41 %	30 %	14 %	98 %	46 %	41 %	30 %	14 %
7	Periode pemenuhan makanan dan minuman pasien yang disediakan	-	71,83 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	59 %	65 %	59 %	48 %	10 0 %	59 %	65 %	59 %	48 %
8	Persentase Kab/Kota yang menyiapkan satu percontohan desa siaga		9 %		18 %	18 %	27 %	36 %	45 %	88 %	86 %	152 %	107 %	30 %	48 8 %	47 7 %	56 2 %	29 7 %	66 %

	kesehatan jiwa																		
9	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSJ	-	5 lynan	-	Paripurna	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									
10	Pesentase masyarakat miskin, gelandangan, orang terlantar yang dilayani di RSJ		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	66 %	42 %	47 %	73 %	0,00 %	66 %	42 %	47 %	73 %
11	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai dengan standar		100 %		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	130 %	46 %	31 %	31 %	16 %	130 %	46 %	31 %	31 %	16 %
12	Persentase pemeliharaan Sarpas RS/RSJ/RS Paru/RS Mata		100 %		99 %	99 %	98 %	98 %	99 %	12 %	17 %	99 %	100 %	81 %	12 %	17 %	100 %	100 %	81 %
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ		78,9 %		80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	100 %	80 %	71 %	82 %	80 %	125 %	100 %	88,75 %	96,4 %	94,11 %

### 2.3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2020, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 95 %. Secara detail capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang memenuhi standar
------------------	---

Dengan indikator kerjanya yakni :

1. RS Jiwa Terakreditasi
2. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
3. Nilai Hijau Untuk Pelayanan Publik oleh Ombudsman

Sasaran ini dicapai melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan – kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesda
2. Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RS Jiwa yang sesuai dengan standard	1. RS Jiwa Terakreditasi	RSJ Terakreditasi Paripurna	RSJ Terakreditasi Paripurna	100 %
		2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	>71	82,230	113 %
		3. Nilai Hijau Untuk Pelayanan publik oleh Ombudsman	Hijau	Hijau	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

## A. Tercapainya Akreditasi RS

Pada Bulan Desember 2017 KARS Pusat melakukan penilaian terhadap RSJD Provinsi Jambi. Adapun hasilnya adalah RSJD Provinsi Jambi dinyatakan **Lulus Dengan Predikat Akreditasi Paripurna**. (Nomor : **KARS-SERT/727/V/2017 tgl 26 Mei 2017**) dan **Kars-Set/1162/XI/2019 tanggal 25 November 2019 lulus Akreditasi Paripurna**, dengan pencapaian nilai di atas 80.

Untuk tahun 2020, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM.02.02/VI/3099/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit. Menindaklanjuti situasi Pandemi dan Bencana Nasional COVID-19 maka Dirjen Pelayanan Kesehatan memutuskan :

1. Kegiatan survei akreditasi Rumah Sakit untuk ditunda pelaksanaannya.
2. Rumah Sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, masih tetap berlaku 1 (satu) tahun setelah bencana nasional penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
3. Kegiatan workshop, pelatihan atau persiapan akreditasi Rumah Sakit yang mengumpulkan banyak orang agar ditunda untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19.
4. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah memiliki sejumlah dokumen SPO , Jumlah Dokumen SPO dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 ada **416 SPO**
- b. Tahun 2017 ada **817 SPO**
- c. Tahun 2018 ada **866 SPO**
- d. Tahun 2019 ada **725 SPO**
- e. Tahun 2020 ada **725 SPO**

Dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Rawat Jalan
2. Rawat Inap

3. IGD
4. Rehabilitasi Mental
5. Keswamas & PKRS
6. K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
7. PPI (Pencegahan & Pengendalian Infeksi (58)
8. Komite Mutu & Keselamatan Pasien
9. UPM ( Unit Pengaduan Masyarakat)
10. IPRS
11. Sanitasi/IPAL
12. Gizi
13. Rekam Medik
14. Radiologi (23)
15. Farmasi
16. Laboratorium (51)
17. Umum (1)
18. Rehabilitasi medik

Hal ini terlaksana adalah dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan RSJD Provinsi Jambi.

**Tabel 2.6 SPO RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020**

Ket	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
<b>SPO</b>	416	817	866	725	725	Turun

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

## **B. Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Pada tahun 2020 Biro Organisasi melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSJD Provinsi Jambi terhadap kualitas 9 unsur pelayanan dan mengacu pada kategori mutu pelayanan. Skor IKM Pelayanan RSJD Provinsi Jambi sebesar 82,230, yang artinya mutu pelayanan B atau kategori BAIK. Unsur pelayanan yang dinilai, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan

4. Biaya / tarif Pelayanan
5. Produk/hasil pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Perilaku petugas pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

**Tabel 2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020**

Ket	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
IKM	77,2	80,86	81,56	84,034	82,230	Turun

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai terdapat 5 unsur penilaian yang mendapat angka di atas Nilai Interval IKM 82,230 yaitu : Biaya atau tarif pelayanan, produk/hasil pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, dan penanganan pengaduan pelayanan dengan nilai IKM tertinggi yaitu 83,961. Sedangkan 4 unsur penilaian mendapat angka di bawah Nilai Interval IKM 82,230 yaitu : unsur persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan kualitas sarana dan prasarana. Nilai IKM yang paling rendah untuk RSJ Provinsi Jambi adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 79,839.

Nilai rata-rata yang diperoleh dari sembilan unsur tersebut adalah sebesar 3,289 dan setelah dikonfersi ke Angka IKM, maka diperoleh angka IKM sebesar 82,230 %. Jika dibanding kan dengan target (> 71), maka persentase realisasi IKM atas pelayanan RSJD Provinsi Jambi adalah sebesar 113 %.

### C. Nilai BOR, BTO, TOI, LOS, NDR, GDR

Indikator kinerja sasaran ini adalah BOR, BTO, LOS, TOI, NDR dan GDR. Indikator ini menggambarkan angka pemanfaatan tempat tidur yang tersedia, lama hari perawatan. Kinerja nyata dari kinerja yang direncanakan tidak sesuai karena terjadinya perubahan cara penghitungan BOR, BTO, LOS, TOI dimana

pembagiannya berdasarkan kelas, tidak lagi total keseluruhan. Berikut Tabel 2.8 yang menyajikan hasil pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Utilisasi/Pemanfaatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi  
Tahun 2016 – 2020**

<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>STANDAR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a.	Kunjungan Pasien R. Jalan	Kunjungan	29.203	40.152	31.124	40.348	29.703	27.819
b.	Kunjungan Pasien R. Inap	Kunjungan	7.780	6230	7.444	7.440	6.511	4.339
c.	Jumlah Tempat Tidur	Buah	270	340	340	290	290	255
d.	BOR	%	60-85	70,14	72,30	89,91	84,08	51
e.	AVLOS	Hari	3-12	28,63	28,63	20,72	14,91	35
f.	TOI	Hari	1-3	11,09	8,56	2,38	3,87	24
g.	NDR	%	≤ 25	-	-	-	2.09	-
h.	GDR	%	≤ 45	-	-	0.89	-	-
i.	BTO	kali	40-50	9,02	9,94	1,29	13,78	1

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Untuk angka BOR secara global belum mencapai nilai ideal yaitu hanya sebesar 51 % dimana nilai ideal BOR adalah 60 – 85 % ( Depkes RI, 2005 ) dan hanya saja belum mencapai target RSJD yaitu 80 %. Untuk angka AVLOS, TOI dan BTO belum berada diangka ideal dikarenakan Rumah Sakit ini merupakan Rumah Sakit Jiwa.

Jika dibandingkan dengan capaian pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9 Capaian Kinerja RSJD Provinsi Jambi  
Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Capaian				Capaian 2020		
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	RS Jiwa Terakreditasi	100 %	100 %	100 %	100 %	RSJ Terakreditasi Paripurna	RSJ Terakreditasi Paripurna	100 %
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	108 %	96,1 %	115 %	118 %	>71	82,230	113 %
3.	Nilai Hijau Untuk Pelayanan Publik oleh Ombudsman	100 %	100 %	100 %	100 %	Hijau	Hijau	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

<b>Sasaran 2</b>	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dengan indikator kerjanya yakni : Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Kesehatan Jiwa masyarakat
------------------	--

Sasaran ini dicapai melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan – kegiatan selain kegiatan pelayanan dalam gedung juga dilakukan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat berbentuk kegiatan integrasi pelayanan kesehatan jiwa di RSU Kabupaten/Puskesmas berupa promosi, penyuluhan dan sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan narkoba kepada masyarakat terutama di desa terpencil, selain itu juga dilakukan kegiatan integrasi, Droping ( pengembalian pasien yang sudah sembuh ke rumahnya), pembebasan pasien pasung, home visite kerumah pasien dan pembentukan desa siaga sehat jiwa.

**Tabel 2.10 Capaian Realisasi Kinerja RSJD Provinsi Jambi  
Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kesehatan Jiwa	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Kesehatan Jiwa masyarakat	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Capaian Kinerja RSJD Provinsi Jambi  
Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Capaian				Capaian 2020		
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Kesehatan Jiwa masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Berikut disajikan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap tahun 2016 sampai dengan 2020 :

**Tabel 2.12 Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap  
RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020**

Kunjungan Pasien	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
<b>Rawat Jalan</b>	40.152	31.124	40.348	29.703	27.819	Turun
<b>Rawat Inap</b>	5.883	7.444	7.440	6.511	4.339	Turun

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Untuk tahun 2020, kunjungan pasien rawat jalan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, hal ini disebabkan oleh karena adanya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dimasyarakat terutama untuk masyarakat di daerah – daerah terpencil dan pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan puskesmas, serta dengan adanya kebijakan BPJS bahwa pasien dari faskes tingkat 1 harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tipe C, dan tidak bisa meloncat di rujuk ke Faskes tipe B, dan itu berdampak terhadap kunjungan pasien BPJS di poli penyakit dalam, gigi, neurologi dan rehabilitasi medik, serta dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini yang menimpa seluruh dunia.

**Tabel 2.13. Data Kunjungan Rawat Jalan RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020**

NO	JENIS KUNJUNGAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	KLINIK SPESIALIS JIWA	11.667	15.498	17.638	18.832	19.152
2	KLINIK PENYAKIT DALAM	0	214	434	235	109
3	SPESIALIS REHAB MEDIK	128	2146	1284	390	45
4	KLINIK NEUROLOGI/SARAF	715	4656	4466	2115	2.320
5	I G D	661	117	1632	1569	1
6	KLINIK GIGI / MULUT	398	4656	850	995	365
7	KLINIK AKUPUNTUR	36	327	354	282	372
8	LABORATORIUM	912	2228	4196	2857	1.381
9	KLINIK PSIKOLOGI	247	336	397	495	272
10	KLINIK FISIOTERAPI	12	5016	4266	1579	848
11	RADIOLOGI	16	131	3758	272	114
12	I P W L / NARKOBA	48	69	81	82	69
13	VCT	0	0	23	0	1
14	MMPI	302	888	43	0	13

15	PTRM	0	949	97	0	317
16	MEDICOLEGAL	0	0	17	0	7
17	EEG	0	20	793	0	5
18	OKUPASI TERAPI	0	0	19	0	743
19	KLINIK ANAK	1	40	4903	0	1
20	REHABILITASI MENTAL	0	0	119	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>64.643</b>	<b>37.291</b>	<b>45.370</b>	<b>29.703</b>	<b>27.772</b>

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

**Tabel 2.14. Jumlah Kegiatan Integrasi, Droping dan Pasien Bebas Pasung pada RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020**

No.	Bulan	Jumlah (2016)	Jumlah (2017)	Jumlah (2018)	Jumlah (2019)	Jumlah (2020)
1	JANUARI	0	30	15	0	0
2	FEBRUARI	77	62	49	28	0
3	MARET	20	20	33	63	0
4	APRIL	42	39	4	30	0
5	MEI	33	43	0	34	0
6	JUNI	25	27	30	9	0
7	JULI	22	15	35	5	37
8	AGUSTUS	20	34	4	30	13
9	SEPTEMBER	29	27	24	28	0
10	OKTOBER	18	20	10	12	0
11	NOVEMBER	64	31	13	18	6
12	DESEMBER	22	36	26	0	28

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

**Tabel 2.15. Kegiatan Droping RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020**

Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
<b>Droping</b>	372	384	243	257	84	Turun

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

**Tabel 2.16. Jumlah dan Asal Pasien Korban Pasung RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020**

No	Kabupaten / Kota	JUMLAH 2016	JUMLAH 2017	JUMLAH 2018	JUMLAH 2019 (L) / (P)	JUMLAH 2020 (L) / (P)
1	Bungo	1	12	4	5 / 1	2 / 0
2	Tebo	1	7	5	4 / 5	3 / 3
3	Kerinci	3	16	7	7	1 / 2
4	Kota Jambi	0	4	2	2	0 / 1
5	Muara Jambi	0	3	1	5	0 / 1
6	Batanghari	0	2	1	0	1 / 0
7	Tanjung Jabung Timur	2	5	5	1 / 1	0 / 1
8	Tanjung Jabung Barat	0	3	0	3	3 / 0
9	Sarolangun	0	8	10	0 / 1	1 / 0
10	Merangin	0	10	4	7 / 1	4 / 1
11	Kota Sungai Penuh	0	4	8	3	0 / 0
12	Luar Provinsi	0	0	0	0	0 / 0
TOTAL		7	74	47	46	15 / 9 (24)

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

**Tabel 2.17. Jumlah Pasien Pasung RSJD Provinsi Jambi**

**Tahun 2016 – 2020**

Nama	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
<b>Jumlah Pasien Pasung</b>	7	74	47	46	24	Turun

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Dari tabel - tabel di atas dapat disimpulkan jumlah pasien pasung setiap tahun berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan adanya kegiatan integrasi, penjangkaran yang diadakan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi serta adanya peningkatan pengetahuan

masyarakat akibat dari seringnya iklan layanan masyarakat tentang bebas pasung yang sering muncul di media televisi dan kerjasama di sektor lain yang terkait, namun untuk Tahun 2020 ini, kegiatan integrasi tidak dapat dilakukan sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda dunia di semua lini kehidupan.

<b>Sasaran 3</b>	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peralatan medik dan penunjang medik RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi
------------------	--

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Sarana dan prasarana sesuai standar (Sesuai permenkes 54 ), terpenuhinya jumlah tempat tidur, dan persentase jenis dan jumlah alat kesehatan.

**Tabel 2.18. Capaian Realisasi Kinerja RSJD Provinsi Jambi Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peralatan medik dan penunjang medik RS	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	85 %	Sarana dan prasarana sesuai standar	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.19 Capaian Kinerja RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Capaian				Capaian 2020		
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	Sarana dan prasarana	100 %

							sesuai standar	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2020 tersebut telah dicapai melalui program dan kegiatan, antara lain :

- a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata (kegiatan pengadaan alat kesehatan) seperti pengadaan CR (Computed Radiology) or Spot Fluorographich x-ray Camera (DAK), Shortwave Diathermy (DAK), Elektrostimulation & Analgesia (DAK), Stetoscope Dewasa (DAK).
- b. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit berupa pembangunan rumah sakit. Untuk Tahun 2020, tidak ada pembangunan gedung yang dilakukan dengan menggunakan dana APBD.
- c. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, yaitu pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit seperti pemeriksaan mikrobiologi dan rectal swab, jasa pembuangan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan IPAL, jasa pemeriksaan limbah cair, jasa pemusnahan sampah medis, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rumah sakit seperti belanja BBM dan STNK.

**Tabel 2.20. Data Tempat Tidur Pasien RSJD Provinsi Jambi Tahun 2016-2020**

Tahun	Tempat Tidur
2016	340
2017	340
2018	290
2019	290
2020	255

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Kapasitas Tempat Tidur RSJD Provinsi Jambi setiap tahun mengalami peningkatan karena jumlah pasien yang dirawat setiap tahun bertambah.

**Tabel 2.21. Kapasitas Tempat Tidur RSJD Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Ruangan Rawat Inap	Jumlah TT	Kelas				Pengelolaan Pasien
			VIP	I	II	III	
1	Teta	20				20	R.Intermediate Laki dewasa
2	Sinta	10				10	Intermediate Perempuan dewasa
3	Epsilon	25		5	20		R.kelas Lk- Lk anak
4	Srikandi	20		8	12		R.Kls Pr remaja
5	Beta	25				25	R.Pasung Lk-lk pasung
6	Arimbi	20				20	R.Pasung Perempuan Dewasa
7	Sigma	20				20	R.Tenang Lk-Lk Dewasa
8	Arjuna	15				15	R.Tenang Laki – laki Dewasa
9	Yudistira	15				15	R.Tenang Laki – laki dewasa
10	Pega	15				15	R.Tenang Laki – laki dewasa
11	Delta	30				30	R.Tenang (Laki – laki dewasa)
12	Gama	35				35	R. Tenang Perempuan Dewasa
13	Lamda Narkoba	20				20	R.Rehab Narkoba
14	Omega	20				20	R.Geriatri
Jumlah		290		13	32	245	

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Selama Tahun 2020, karena Ruang Rawat Arjuna dan Sinta dalam proses perbaikan, maka tidak dapat digunakan untuk merawat pasien.

<b>Sasaran 4</b>	Meningkatkan jumlah, jenis dan kualitas SDM RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi
------------------	---

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah jumlah dokter spesialis jiwa, rasio dokter umum dengan pasien, rasio tenaga paramedis dengan tempat tidur, terpenuhinya jumlah tempat tidur, dan prosentase jenis dan jumlah alat kesehatan.

**Tabel 2.22 Capaian Realisasi Kinerja RSJD Provinsi Jambi  
Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan jumlah, jenis dan kualitas SDM RS	SDM sesuai dengan standar	80 %	SDM sesuai dengan standar	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.1. Capaian Kinerja 2016 – 2020**

No	Indikator	Capaian				Capaian 2020		
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	SDM sesuai dengan standar	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	SDM sesuai dengan standar	100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2020.

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2020 tersebut telah dicapai melalui program dan kegiatan, antara lain :

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pelatihan, kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pegawai
- Jumlah diklat intern yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi bagi pegawai.

<b>Sasaran 5</b>	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan RS
------------------	---

Indikator kinerja sasaran ini adalah :

- Predikat SAKIP B
- Predikat Sehat A untuk penilaian Kinerja oleh BPKP

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di tahun 2020 berupa SAKIP RS Jiwa mendapat Predikat B dan mendapat WTP dari BPKP. Sasaran ini dicapai melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan – kegiatan :

1. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2. Kegiatan penyediaan surat menyurat
3. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Kegiatan jasa administrasi keuangan
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Kegiatan penyediaan ATK
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
9. Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Kegiatan penyusunan perancaan program dan anggaran.

**Tabel. 2.5.1 .Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan RS	- Nilai SAKIP B - Predikat sehat A untuk penilaian kinerja oleh BPKP	- Predikat B - Sehat A	- Predikat B - Sehat A	- 100 % - 100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa RS Jiwa sudah dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5.2. Capaian Kinerja 2016 - 2020**

No.	Indikator	Capaian				Capaian 2020		
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	- Nilai SAKIP B - Predikat sehat A untuk penilaian kinerja oleh BPKP	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	- Nilai Sakip B - Predikat sehat A untuk penilaian kinerja oleh BPKP	- Predikat B - Sehat A	- 100 % - 100 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

<b>Sasaran 6</b>	Mewujudkan RS Jiwa sebagai tempat praktek, magang, penelitian oleh institusi pendidikan
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu :

- Jumlah institusi pendidikan kesehatan yang bekerjasama dengan RS

Sasaran ini dicapai melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

**Tabel. 2.6. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan RS Jiwa sebagai tempat praktek, magang, penelitian oleh Institusi pendidikan	Jumlah insititusi pendidikan yang bekerjasama RS	- 12 insititusi	- 5 insititusi	- 41,7 %

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi, 2021

Untuk tahun 2020 sebanyak 5 institusi pendidikan yang melaksanakan praktek/magang di RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Hal ini mengalami penurunan dikarenakan dampak wabah Covid-19 yang melanda segala lini kehidupan.

Berikut disajikan Tabel institusi pendidikan yang melaksanakan magang tahun 2016 - 2020 :

**Tabel .Institusi Kesehatan yang melaksanakan magang  
RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi  
Tahun 2016 - 2020**

<b>Institusi Kesehatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Jumlah</b>	15	17	21	22	5

Sumber : Data RSJD Provinsi Jambi

Indikator kinerja sasaran adalah jumlah institusi yang melaksanakan magang di RS Jiwa, targetnya 12 institusi sedangkan realisasinya 5 institusi (41,7 %). Hal ini tercapai karena Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan tetapi juga sebagai sarana pendidikan, namun karena adanya wabah Covid-19 sehingga menyebabkan perubahan pola pengajaran ( dengan kegiatan daring) di setiap insititusi sehingga berdampak kepada kegiatan magang di RS Jiwa.

Tabel T-C. 24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSJD Provinsi Jambi

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.354.912.300	8.090.403.530	8.899.443.883	9.789.388.271	10.768.327.098	7.033.212.314	5.650.443.745	4.353.917.220	3.976.607.680	2.422.710.959	95,63	69,84	48,92	40,62	22,50	8.980.490.164	4.410.824.669
1 . Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.800.000	8.580.000	9.438.000	10.381.800	11.419.980	7.800.000	7.800.000	7.800.000	4.170.000	4.050.000	100,00	90,91	82,64	40,17	35,46	9.523.956	6.342.000
2 . Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	849.600.000	934.560.000	1.028.016.000	1.130.817.600	1.243.899.360	866.400.000	1.014.396.000	752.400.000	626.400.000	896.064.996	101,98	108,54	73,19	55,39	72,04	207.475.718	831.132.199
3 . Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	323.547.300	355.902.030	391.492.233	430.641.456	473.705.602	323.547.300	1.014.396.000	218.763.500	246.400.000	249.333.600	100,00	285,02	55,88	57,22	52,63	395.057.724	454.240.780

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4 . Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	866.000.00	952.600.00	1.047.860.00	1.152.646.00	1.267.910.600	865.960.000	773.512.120	773.512.120	847.467.000	765.090.000	100,00	81,20	73,82	73,52	60,34	1.057.403.320	805.108.248
5 . Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.000.00	154.000.00	169.400.00	186.340.00	204.974.000	-	199.134.380	329.871.000	209.564.500	196.391.163	0,00	129,31	194,73	112,46	95,81	170.942.800	145.079.408
6 . Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.00	220.000.00	242.000.00	266.200.00	292.820.000	-	247.998.000	329.871.000	332.013.680	231.881.200	0,00	112,73	136,31	124,72	79,19	244.204.000	228.352.776
7 . Kegiatan Penyediaan Komp. Inst Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.051.000	-
8 . Kegiatan Penyediaan Peralatan	400.000.00	440.000.00	484.000.00	532.400.00	585.640.000	-	1.129.784.015	1.219.966.600	1.167.422.500	-	0,00	256,77	252,06	219,28	0,00	488.408.000	703.434.623

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Perlengka pan Kantor																	
9 Kegiatan Penyediaa n Peralatan RT	475.5 25.00 0	523.0 77.50 0	575.3 85.25 0	632.9 23.77 5	696.2 16.15 3	491. 565. 014	950.0 04.00 0	- - -	- - -	- - -	103, 37	181, 62	0,00	0,00	0,00	580.6 25.53 5	288.3 13.80 2)
1 0 Kegiatan Penyediaa n makanan dan minuman	3.705 .440. 000	4.075. 984.0 00	4.483. 582.4 00	4.931. 940.6 40	5.425. 134.7 04	3.70 5.44 0.00 0	22.50 0.000 0.000	27.00 0.000 0.000	55.17 0.000 0.000	54.90 0.000 0.000	100, 00	0,55	0,60	1,12	1,01	4.524. 416.3 48	773.0 02.00 0
1 1 Kegiatan Rapat- rapat Koordinas i & Konsultas i ke Luar Daerah	737.0 00.00 0	810.7 00.00 0	891.7 70.00 0	980.9 47.00 0	1.079. 041.7 00	772. 500. 000	290.9 19.23 0	694.7 33.00 0	488.0 00.00 0	25.00 0.000 0.000	104, 82	35,8 8	77,9 0	49,7 5	2,32	899.8 91.74 0	454.2 30.44 4
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.395 .919. 946	2.298. 991.9 41	2.048. 891.1 35	2.613. 780.2 48	2.795. 158.2 73	1.40 3.64 9.94 6	445.0 00.00 0	- - -	298.0 00.00 0	194.0 00.00 0	100, 55%	19,3 6	0,00	11,4 0	6,94	2.230. 548.3 08	468.1 29.98 9

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 . Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	33.20 0.000	800.0 00.00	400.0 00.00	800.0 00.00	800.0 00.00	33.2 00.0	445.0 00.00	- 0	298.0 00.00	194.0 00.00	100, 00	55,6 3	0,00	37,2 5	24,2 5	566.6 40.00	194.0 00.00
2 . Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.362 .719. 946	1.498. 991.9 41	1.648. 891.1 35	1.813. 780.2 48	1.995. 158.2 73	1.37 0.44 9.94 6	-	-	-	-	100, 57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663. 908.3 08	0
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	168.0 00.00 0	184.8 00.00 0	203.2 80.00 0	223.6 08.00 0	245.9 68.80 0	168. 000. 000	177.7 54.50 0	182.7 00.00 0	185.8 50.00 0	194.0 00.00 0	100, 00%	96,1 9	89,8 8	83,1 1	78,8 7	205.1 31.36 0	181.6 60.90 0
1 . Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	168.0 00.00 0	184.8 00.00 0	203.2 80.00 0	223.6 08.00 0	245.9 68.80 0	168. 000. 000	257.4 48.00 0	182.7 00.00 0	185.8 50.00 0	194.0 00.00 0	100, 00	139, 31	89,8 8	83,1 1	78,8 7	205.1 31.36 0	197.5 99.60 0
<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>	200.0 00.00 0	220.0 00.00 0	242.0 00.00 0	223.6 08.00 0	245.9 68.80 0	769. 900. 000	406.6 51.85 8	330.0 00.00 0	481.5 00.00 0	262.5 00.00 0	384, 95	184, 84	136, 36	215, 33	106, 72	226.3 15.36 0	450.1 10.37 1

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sumber daya Aparatur</b>																	
1 . Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	168.000.000	184.800.000	203.280.000	223.608.000	245.968.800	769.900.000	406.154.325	330.000.000	481.500.000	262.500.000	458,27	219,78	162,34	215,33	106,72	205.171.360	450.010.865
<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	1.700.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	3.984.041.985	4.556.913.197	4.176.913.197	4.565.968.417	88,24	199,20	227,85	208,85	228,30	1.940.000.000	3.756.767.359
1 . Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.700.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	2.842.913.501	4.556.913.197	4.176.913.197	4.565.968.417	88,24	142,15	227,85	208,85	228,30	1.940.000.000	3.756.767.359
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	785.725.000	864.297.500	950.727.250	1.045.799.975	1.150.379.973	785.724.986	405.000.000	390.805.600	310.000.000	160.000.000	98,22	46,02	41,11	29,64	13,91	959.385.939	410.306.117
1 . Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	785.725.000	864.297.500	950.727.250	1.045.799.975	1.150.379.973	785.724.986	405.000.000	390.805.600	310.000.000	160.000.000	100,00	46,86	41,11	29,64	13,91	959.385.939	410.306.117

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	-	2.929.935,00	3.258.810,00	2.958.810,00	2.651.810,00	0,00	58,60	65,18	59,18	48,21	5.100.000,00	7.759.873,00
1 . Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	-	2.929.935,00	3.258.810,00	2.958.810,00	2.651.810,00	0,00	58,60	65,18	59,18	48,21	5.100.000,00	7.759.873,00
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	350.000,00	385.000,00	250.577,69	275.635,45	303.199,05	309.389,000	329.295,00	380.384,00	295.929,00	91.400,000	88,40	85,53	151,80	107,36	30,15	312.882,43	281.279,40
1 . Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	350.000,00	385.000,00	250.577,69	275.635,45	303.199,05	309.389,000	329.295,00	380.384,00	295.929,00	91.400,000	88,40	85,53	151,80	107,36	30,15	312.882,43	281.279,40
<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	-	-	175.500,00	148.500,00	15.500,000	0,00	0,00	87,75	67,50	6,40	212.400,00	67.900,000

PROGRAM dan KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Program Anggaran	200.000.000	200.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	-	-	175.500.000	148.500.000	15.500.000	0,00	0,00	87,75	67,50	6,40	212.400.000	67.900.000
<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)</b>		3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	-	2.393.342.049	1.500.000.000	1.700.000.000	2.620.000.000	0,00	66,48	41,67	47,22	72,78	3.600.000.000	1.642.668.409
1	Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Pasien Korban Pasung dan Gelandangan Psikotik	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	-	2.393.342.049	1.500.000.000	1.700.000.000	2.620.000.000	0,00	66,48	41,67	47,22	72,78	3.600.000.000	1.642.668.409
<b>Program Pengadaan, Peningk</b>		10.00	13.00	14.30	10.50	11.00	13.021.9	6.034.	4.501.	3.297.	1.750.	130,22	46,42	31,48	31,41	15,92	4.307.	5.721.

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Sarpras RS/RSJ/RS Paru/ Mata</b>	0.000 .000	0.000. 000	0.000. 000	0.000. 000	0.000. 000	80.6 75	597.1 88	791.2 50	548.8 90	809.4 00						460.0 00	345.4 80
1 Kegiatan Pembang unan Rumah Sakit	4.441 .680. 000	7.500. 000.0 00	8.250. 000.0 00	3.500. 000.0 00	4.441. 680.0 00	6.60 5.18 0.00 0	-	2.700. 120.8 50	2.426. 673.7 90	-	148, 71	0,00	32,7 3	69,3 3	0,00	5.626. 672.0 00	2.346. 394.9 28
2 Kegiatan Rehabilita si Bangunan Rumah Sakit	4.111 .857. 000	4.418. 890.7 00	4.860. 779.7 70	5.346. 857.7 47	5.000. 000.0 00	4.71 2.42 2.00 0	3.202. 000.5 50	-	-	-	114, 61	72,4 6	0,00	0,00	0,00	4.747. 677.0 43	1.582. 884.1 10
3 Kegiatan Pengadaa n Alat- alat Kesehatan Rumah Sakit	1.100 .000. 000	700.0 00.00 0	770.0 00.00 0	1.192. 000.0 00	1.051. 063.5 22	1.44 6.11 2.67 5	2.546. 242.6 22	1.262. 369.4 00	481.1 26.10 0	1.438. 620.0 00	131, 46	363, 75	163, 94	40,3 6	136, 87	2.406. 531.7 61	1.434. 894.1 59
4 Kegiatan Pengadaa n bahan - bahan logistik RS	346.4 63.00 0	381.1 09.30 0	419.2 20.23 0	461.1 42.25 3	507.2 56.47 8	258. 266. 000	286.3 54.01 6	539.3 01.00 0	389.7 49.00 0	312.1 89.40 0	74,5 4	75,1 4	128, 64	84,5 2	61,5 4	423.0 38.25 2	357.1 71.88 3

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pemeliharaan Sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata</b>	500.0 00.00 0	550.0 00.00 0	1.294. 091.4 66	1.423. 500.6 12	1.565. 850.6 73	61.0 97.0 79		1.283. 045.0 79	1.420. 107.1 29	1.267. 372.0 00	12,2 2	0,00	99,1 5	99,7 6	80,9 4	1.066. 688.5 50	806.3 24.25 7
1 . Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber kala Inst. Pengolahan Limbah RS	54.49 7.079	59.94 6.787	65.94 1.466	72.53 5.612	79.78 9.173	61.0 97.0 79	92.29 7.079	92.29 7.079	93.65 9.129	92.20 0.000	112, 11	153, 97	139, 97	129, 12	115, 55	66.54 2.023	86.31 0.073
2 . Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber kala Kendaraan Dinas/Op erasional	365.0 00.00 0	401.5 00.00 0	441.6 50.00 0	485.8 15.00 0	534.3 96.50 0	336. 500. 000	293.6 00.00 0	312.6 00.00 0	312.6 00.00 0	317.0 00.00 0	92,1 9	73,1 3	70,7 8	64,3 5	59,3 2	534.0 02.30 0	251.9 40.00 0
3 . Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber kala Peralatan	650.0 00.00 0	715.0 00.00 0	786.5 00.00 0	865.1 50.00 0	951.6 65.00 0	-	1.937. 471.5 52	878.1 48.00 0	1.013. 848.0 00	858.1 72.00 0	0,00	270, 98	111, 65	117, 19	90,1 8	793.6 63.00 0	9.375. 279.1 04

PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Gedung Kantor																	
<b>Program peningkatan Mutu pelayanan kesehatan BLUD</b>	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	22.638.518.592	20.495.241.330	23.842.344.482	23.277.789.000	100,00	78,06	70,67	82,21	80,27	29.000.000	18.050.778.680)
1 . Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	22.638.518.592	20.495.241.330	23.842.344.482	23.277.789.000	100,00	78,06	70,67	82,21	80,27	29.000.000	18.050.778.680)

Adapun kondisi anggaran belanja dan realisasi pendanaan di RSJD Provinsi Jambi pada periode RPJMD 2016-2020 adalah sebagai berikut:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Arah kebijakan ini adalah guna terselenggaranya pelayanan administrasi yang baik.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	6.536.945.107	4.550.039.730	4.218.202.770	3.976.607.680	2.422.710.959
<b>Realisasi</b>	5.551.958.192	3.876.553.423	3.786.230.677	3.739.148.337	2.221.474.551

Sumber : Data Keuangan RSJD

ini terjadi akibat adanya kelebihan anggaran biaya jasa komunikasi, air dan listrik serta kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan sisa pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor.

### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan langkah awal bagi pelayanan Rumah Sakit Jiwa untuk mempertahankan serta menuju lebih baik lagi ke depannya didalam soal pelayanan terhadap masyarakat

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	1.187.758.521	5.840.145.808	915.148.000	1.727.348.000	906.237.000
<b>Realisasi</b>	1.152.103.000	3.773.376.500	849.306.499	1.478.254.000	734.557.500

Sumber : Data Keuangan RSJD

Hal ini terjadi akibat adanya sisa dari pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor .

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan sebagai kegiatan pendukung terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang disiplin aparatur.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	168.000.000	257.448.000	182.700.000	185.850.000	194.000.000
<b>Realisasi</b>	167.600.000	218.601.300	172.215.000	177.754.500	193.900.000

Sumber : Data Keuangan RSJD

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	199.200.000	406.154.325	330.000.000	481.500.000	262.500.000
<b>Realisasi</b>	197.474.899	313.348.820	288.831.871	406.651.858	75.471.200

Sumber : Data Keuangan RSJD

hal ini disebabkan karena kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang tidak bias terlaksana secara maksimal karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

#### 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai sebagai salah satu penunjang pokok dalam upaya penyembuhan pasien.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	1.500.000.000	2.842.913.501	4.556.913.197	4.176.913.197	4.565.968.417
<b>Realisasi</b>	1.498.432.311	2.840.717.933	4.396.080.141	3.984.041.985	4.539.257.241

Sumber : Data Keuangan RSJD

## 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah upaya pelayanan kesehatan yang prima khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	235.724.986	405.000.000	390.805.600	310.000.000	160.000.000
Realisasi	233.842.962	370.454.199	189.977.278	299.908.695	136.874.539

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian diatas terlihat sisa anggaran yang terpakai untuk kegiatan ini Rp. 23.125.461,-

## 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima. Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	9.228.392.837	11.183.610.13 8	4.501.791.250	3.297.548.890	1.750.809.400
Realisasi	8.973.965.236	10.149.647.51 8	3.590.679.075	3.109.456.091	1.496.811.000

Sumber : Data Keuangan RSJD

Hal ini terjadi dikarenakan adanya penawaran yang lebih rendah oleh pihak ke tiga pada saat lelang.

## 8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit serta pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	286.289.079	385.897.079	404.897.079	406.259.129	409.200.000
Realisasi	283.805.118	341.928.897	279.260.500	359.335.550	322.051.790

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian data diatas, terlihat semua dana yang terpakai sudah sesuai dengan peruntukannya, hanya saja masih ada dana tersisa .

## 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan ini adalah terselenggaranya promosi dan sosialisasi program kesehatan jiwa.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	286.289.079	329.295.000	380.384.000	295.929.000	91.400.000
Realisasi	283.805.118	196.337.273	284.604.434	245.178.897	70.904.047

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian diatas semua anggaran yang terpakai sesuai dengan peruntukannya dan masih tersisa

## 10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Arah kebijakan ini adalah Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	25.418.735.940	22.683.518.592	20.495.241.330	23.842.344.482	23.277.789.000
<b>Realisasi</b>	19.206.815.855	21.154.036.090	17.187.263.079	18.713.498.211	14.971.684.923

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian diatas ternyata semua dana yang disediakan sudah terpakai sesuai dengan peruntukannya .

#### 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Arah kebijakan ini adalah kegiatan penyediaan makanan dan minuman pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	-	2.929.935.000	2.929.935.000	2.958.810.000	2.651.810.000
<b>Realisasi</b>	-	2.269.708.730	2.269.708.730	2.445.659.280	1.788.347.900

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian diatas semua anggaran yang terpakai sesuai dengan peruntukannya dan masih tersisa.Hal ini dikarenakan perbedaan harga pada saat membeli.

#### 12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)

Arah kebijakan ini adalah kegiatan pembiayaan pasien korban pasung dan gelandangan psikotik yang tidak ditanggung BPJS.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anggaran</b>	-	2.393.342.049	1.500.000.000	1.700.000.000	2.620.000.000
<b>Realisasi</b>	-	587.295.358	1.495.920.243	1.699.857.807	2.618.721.107

Sumber : Data Keuangan RSJD

Dari uraian diatas semua anggaran yang terpakai sesuai dengan peruntukannya karena banyaknya pasien yang tidak memiliki kartu BPJS dan dana masih tersisa

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSJD Provinsi Jambi**

### **2.4.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal**

Identifikasi dan analisis kondisi internal diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang ada di dalam organisasi RSJD Provinsi Jambi yang dapat memacu/menghambat terwujudnya pelayanan prima dan professional secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ada 2 (dua) faktor yang dapat dilihat dari sudut internal yaitu aspek kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

Kekuatan yang dimiliki oleh RSJD Provinsi Jambi adalah:

1. RSJD Provinsi Jambi sebagai Pusat Rujukan Bidang Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA.
2. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. RSJD Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Adanya dokter Spesialis Jiwa
5. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan jiwa.
6. Adanya inovasi – inovasi pelayanan, meliputi pelayanan penjemputan dan pengantaran ODGJ serta pembentukan Desa Siaga di kabupaten kota se- Provinsi Jambi.
7. RS Jiwa terakreditasi

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh RSJD Provinsi Jambi antara lain:

1. Disiplin pegawai meliputi budaya kerja, kreativitas, etos kerja dan professional masih menuju ke tingkat yang optimal.
2. Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS ) belum optimal.
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memadai.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana belum optimal disebabkan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan non-jiwa.

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Optimal belum berjalan sempurna.
6. Koordinasi dan kerjasama di tiap-tiap unit dari level atas sampai level terendah masih belum optimal karena belum semua pegawai memahami tugas dan fungsi masing-masing.
7. Promosi layanan belum optimal.

#### **2.4.2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal**

Identifikasi dan analisis kondisi eksternal diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan peluang dan faktor-faktor yang merupakan ancaman dalam memacu terwujudnya pelayanan prima yang profesional.

Peluang bagi RSJD Provinsi Jambi untuk mengembangkan layanannya adalah:

1. Lokasi RSJD yang mudah dijangkau.
2. Adanya sumber pembiayaan kesehatan dari APBD dan BLUD
3. Adanya Kebijakan Pemerintah yang menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Adanya koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektoral dengan instansi lain atau pihak lain yang terkait (*stakeholders*/pemangku kepentingan)
5. Adanya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa, Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
6. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jiwa meningkat
7. Lokasi RSJD yang mudah dijangkau.
8. Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa khususnya di daerah-daerah terpencil di kabupaten masih rendah yang dapat menjadi peluang inovasi untuk peningkatan layanan.
9. Stigma masyarakat tentang RS Jiwa pada beberapa kelompok masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk pelayanan promosi kesehatan jiwa.

Adapun ancaman bagi pelaksanaan Tugas dan Fungsi RSJD Provinsi Jambi adalah:

1. Kondisi ekonomi masyarakat Jambi menengah ke bawah yang menghambat pemenuhan upaya kesehatan perorangan ke RSJD Provinsi Jambi.
2. Meningkatnya tekanan/stressor akibat Peningkatan suhu Politik, Perubahan alam dan Perubahan gaya hidup serta Pengaruh globalisasi.
3. Informasi dan teknologi yang disalahgunakan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSJD Provinsi Jambi**

Setelah lebih dari 76 tahun Negara Indonesia merdeka, ternyata berbagai permasalahan pada bangsa ini selalu terjadi, tidak hanya permasalahan politik, kedaulatan NKRI, moral bangsa, masalah pendidikan termasuk juga masalah kesehatan.

Masalah kesehatan jiwa masyarakat yang sering terjadi dan menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah adalah maraknya kasus bunuh diri, kejahatan seksual baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa, masalah meningkatnya angka penyalahgunaan NAPZA, masih tingginya angka penderita gangguan mental ringan Depresi 6,1%, Gangguan Mental Emosional 9,8% serta masih tingginya angka penderita gangguan jiwa berat di Indonesia, 6,7 permil rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa skizofrenia/psikosis. angka orang dengan gangguan jiwa berat yang pernah dipasung masih sebesar 14,0% dari jumlah ODGJ yang ada dengan tingkat pasung di pedesaan lebih besar dari perkotaan (17,7% vs 10,7%) (Riskesmas, 2018).

Untuk mengatasi semua permasalahan di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Rencana Strategi tahun 2020-2024, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kuat, hal ini ditandai dengan penduduknya hidup dengan berperilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 dimana upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk :

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
6. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

Saat ini berbagai masalah kesehatan juga sering terjadi dalam wilayah Provinsi Jambi, antara lain : banyaknya warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, belum semua Puskesmas dan RS yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan masih terdapat orang dengan gangguan jiwa berat yang terlantar dan yang di pasung. Berdasarkan data dari hasil Riskesdas 2018, bahwa di Provinsi Jambi bahwa proporsi rumah tangga dengan anggota memiliki gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,6 permil, lebih rendah 0,1 permil bila dibandingkan dengan proporsi secara nasional. Prevalensi penyakit jiwa lainnya adalah:

1. Depresi, 1,8%; Nasional 6,1%.
2. Gangguan Mental Emosional 3,6%; Nasional 9,8%.

Selain permasalahan di atas, beberapa isu lain yang terkait masalah kesehatan jiwa masyarakat adalah adanya stigma buruk masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan jiwanya.

Berdasarkan data dan informasi di atas, permasalahan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum semua Puskesmas dan RS di kabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.
2. Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJ oleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.
3. Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.
4. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).
5. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
6. Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan *rewards* dan *punishments* yang jelas juga dirasakan masih kurang.
7. Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien.
8. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

Permasalahan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan oleh RSJD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Pelaksanaan Mutu Pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar pelayanan optimal
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal karena kurang memadainya peralatan kesehatan dan belum sesuai dengan standar kelas RS)
- 3) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar sehingga perlu ditingkatkan secara kontinue dan berkesinambungan.
- 4) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi

Tabel T-B.35

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Di RSJD Provinsi Jambi**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa dan non-jiwa	Belum semua Puskesmas dan RS di kabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.	Mutu Pelayanan Kesehatan belum Memadai
	Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJ oleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.	
	Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.	
Pemanfaatan sarana prasarana belum optimal	Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai
	Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.	
Rendahnya profesionalisme SDM	Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan rewards dan punishments yang jelas juga dirasakan masih kurang.	Jumlah dan jenis SDM belum memenuhi standar
Sistem Informasi belum optimal	Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien	SIM RS yang belum terintegrasi
	Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.	

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, dicanangkan Visi Provinsi Jambi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”*** .

#### 2. Misi

Upaya untuk mencapai visi tersebut Gubernur Jambi telah merumuskan misinya adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas SDM.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan RSJD Provinsi Jambi mendukung misi III (Ketiga) “Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Jambi, RSJD Provinsi Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya RSJD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa ;
4. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa ;
5. Pelayanan medis ;
6. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. Pelayanan keperawatan;
8. Pelayanan rujukan;
9. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat;
11. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
12. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program urusan RSJD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSJD Provinsi Jambi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

Faktor Pendorong yang dimiliki oleh RSJD Provinsi Jambi adalah:

1. RSJD Provinsi Jambi sebagai Pusat Rujukan Bidang Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA.

2. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. RSJD Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Adanya dokter Spesialis Jiwa
5. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan jiwa.
6. Adanya inovasi – inovasi pelayanan, meliputi pelayanan penjemputan dan pengantaran ODGJ serta pembentukan Desa Siaga di kabupaten kota se- Provinsi Jambi.
7. RS Jiwa terakreditasi
8. Adanya program pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Jamkesmasda

Faktor Penghambat yang dimiliki oleh RSJD Provinsi Jambi antara lain:

1. Disiplin pegawai meliputi budaya kerja, kreativitas, etos kerja dan professional masih menuju ke tingkat yang optimal.
2. Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS ) belum optimal.
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memadai.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana belum optimal disebabkan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan non-jiwa.
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Optimal belum berjalan sempurna.
6. Koordinasi dan kerjasama di tiap-tiap unit dari level atas sampai level terendah masih belum optimal karena belum semua pegawai memahami tugas dan fungsi masing-masing.
7. Promosi layanan belum optimal.

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen negara yang berisi upaya- upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2020-2024, serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* jajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II.

Menguatnya Peran Provinsi dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan, maka UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini telah memberikan peran yang cukup kuat bagi provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten dan kota di wilayahnya. Pengawasan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat diserahkan sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian Kesehatan, karena provinsi telah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan SPM.

Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun 2014 juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu program Kementerian Kesehatan adalah pencegahan dan pengendalian penyakit dengan sasaran program adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa. Salah satu

kegiatan yang dilaksanakan adalah pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA.

Indikator pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan sebesar 100%.
2. Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis sebanyak 11.500 orang.
3. Presentase penderita depresi pada penduduk  $\geq 15$  tahun yang mendapat layanan sebesar 50%.
4. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk  $\geq 15$  tahun yang mendapat layanan sebesar 50%.

RSJD Provinsi Jambi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berperan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA memiliki keterkaitan erat dengan indikator pencapaian sasaran di atas, di mana upaya Kesehatan Jiwa memperoleh perhatian besar dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Selain itu dalam Pembangunan dan pengembangan RSJD Provinsi Jambi perlu bersinergi dengan arah kebijakan dan strategi nasional, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada RTRW Provinsi Jambi, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. RSJD Provinsi Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang

membantu Gubernur dalam pembangunan bidang kesehatan tidak membahas mengenai tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi, dan adanya kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir), sementara masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu, maka permasalahan yang terseleksi sebagai isu strategis adalah sebagai berikut :

#### **3.5.1. Isu Strategis yang terkait Mutu Pelayanan**

1. Belum tersedianya sub-spesialistik kesehatan jiwa di Provinsi Jambi.
2. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi, spesialis anak dan spesialis penyakit kulit dan kelamin untuk memenuhi standar pelayanan RS.
3. Jumlah SDM PNS masih sangat terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak dan menambah pembiayaan RS.
4. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
5. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS.
6. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

### **3.5.2 Isu Strategis yang terkait sektor lain/*stakeholders* lain**

1. Adanya program jaminan kesehatan nasional tetapi belum memiliki mekanisme pelayanan maupun pembiayaan yang proporsional terutama bila dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Belum semua Kabupaten/Kota menganggarkan pembiayaan untuk pasien miskin atau terlantar melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terakomodir oleh BPJS. Hingga saat ini, hanya satu kabupaten yang menganggarkan Jamkesda (Kabupaten Tebo).
3. Sistem layanan yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.
4. Masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi yang kemungkinan besar dapat mengancam kesehatan jiwa masyarakat tersebut.
5. Minimnya Peran lintas sektor terkait dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan, peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

### **3.5.3 Isu Strategis terkait pelanggan**

1. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya.
2. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
3. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor gaya hidup (fisik megah, pelayanan spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih).

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah RSJD Provinsi Jambi**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSJD Provinsi Jambi, Tujuan pelaksanaan Program dan Kegiatan RSJD yang tertuang dalam Renstra ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Sasaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan RSJD yang tertuang dalam Renstra ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJD Provinsi Jambi**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola rumah sakit yang yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB
Meningkatnya kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	Nilai IKM	83	84	84	85	86

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RSJD Provinsi Jambi, adalah :

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Pengembangan RSJD Provinsi Jambi
3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
4. Memperkuat sistem pengawasan, monitoring, penatausahaan dan pelaksanaan sistem keuangan.
5. Memperkuat sistem pelayanan dengan dukungan teknologi, sistem informasi dan penambahan tenaga spesialis non-jiwa.
6. Melengkapi Sarana, Prasarana termasuk peralatan medik dan non medik.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh RSJD Provinsi Jambi, diarahkan pada :

1. Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel, agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil.
2. Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan.
3. Menerapkan peraturan – peraturan aparatur sipil negara terkait kedisiplinan.
4. Meningkatkan pendapatan RSJD Provinsi Jambi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan.
7. Memanfaatkan media dan *stakeholders* sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.
8. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

**Tabel T-C.26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSJD Provinsi Jambi**

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
Misi 1 : Memantapkan Tata kelola Pemerintah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel, agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil.
	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan 2. Pengembangan RSJD Provinsi Jambi	1. Memenuhi kekurangan tenaga, meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta membudayakan sistem reward dan punishment. 2. Melengkapi Sarana, Prasarana RS termasuk peralatan

			<p>medik dan non medik.</p> <p>3. Memanfaatkan media dan <i>stakeholders</i> sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.</p>
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan adalah hakikat dari perencanaan dan menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dan tertuang dalam Rencana strategis RSJD Provinsi Jambi sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenclatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka program/kegiatan RSJD Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan :

- A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
  - 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F. Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
  - G. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - H. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan :

- A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Pembangunan RS Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
  2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS
  3. Pengadaan Sarana fasilitas layanan kesehatan
  4. Pengadaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan
  5. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
  6. Penyediaan Bahan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Bahan Habis Pakai Lainnya)
  7. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  8. Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya
  9. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- B. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi
  1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAZPA

4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
6. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSJD Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.02.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat SAKIP	B	B	58,525,000,000	B	63,156,400,000	B	67,818,790,000	B	73,236,444,000	BB	86	79,195,863,400	BB	341,932,497,400	RSJD	Jambi	
	Terwujudnya Birokrasi yang	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	85 %	85 %	255,000,000	85 %	290,000,000	85 %	290,000,000	85 %	290,000,000	85 %	290,000,000	85 %	1,415,000,000	85 %	1,415,000,000	RSJD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
Kapasitas pelayanan publik yang prima	Perangkat Daerah	yang disusun	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA																
						1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4 dok	90,000,000	4 dok	115,000,000	4 dok	115,000,000	4 dok	115,000,000	4 dok	115,000,000	20 dok	550,000,000	RS JD	Jambi
						1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dok	70,000,000	8 dok	135,000,000	8 dok	135,000,000	8 dok	135,000,000	8 dok	135,000,000	40 dok	615,000,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.01 .1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	95,000,000	2 dok	40,000,000	2 dok	40,000,000	2 dok	40,000,000	3 dok	40,000,000	11 dok	255,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.01 .1.02	Administrasi Keuangan	Persentase kegiatan Keuangan	100 %	100 %	35,250,000,000	100 %	63,156,400,000	100 %	47,371,500,000	100 %	67,818,790,000	100 %	73,236,444,000	100 %	341,932,497,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Perangkat Daerah</b>															
		1.02.01 .1.02.01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.209 Orang/Bulan	3.300 Orang/Bulan	35,250,000	3.300 Orang/Bulan	38,181,500	3.300 Orang/Bulan	42,820,150,000	3.300 Orang/Bulan	46,702,165,000	3.300 Orang/Bulan	51,022,381,500	16.500 Orang/Bulan	213,932,497,400	RS JD	Jambi
		<b>1.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>431,000,000</b>	<b>95 %</b>	<b>457,000,000</b>	<b>95 %</b>	<b>507,950,000</b>	<b>95 %</b>	<b>528,520,000</b>	<b>95 %</b>	<b>551,147,000</b>	<b>95 %</b>	<b>2,475,617,000</b>	<b>RS JD</b>	<b>Jambi</b>
		1.02.01 .1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	388 paket	435 paket	261,000,000	450 paket	270,000,000	465 paket	302,250,000	470 paket	302,250,000	470 paket	302,250,000	2290	1,437,750,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Beserta Atribut Kelengkapannya	Beserta Atribut Kelengkapan												paket			
		1.02.01 .1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang 170,000	45 Orang ,000	187,000	47 Orang ,000	205,700	48 Orang ,000	226,270	50 Orang ,000	248,897	230 Orang	1,037,867,000	RS JD	Jambi	
		1.02.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	96 %	96 % 750,000	96 % ,000	825,000	96 % ,000	907,500	96 % ,000	998,250	96 % ,000	1,098,075,000	96 % 5,000	4,578,825,000	RS JD	Jambi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	40 Paket	250,000,000	40 Paket	275,000,000	42 Paket	302,500,000	42 Paket	332,750,000	45 Paket	366,025,000	209 Paket	1,526,275,000	RS JD	Jambi
		1.02.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	12 Paket	300,000,000	13 Paket	330,000,000	13 Paket	363,000,000	14 Paket	399,300,000	14 Paket	439,230,000	66 Paket	1,831,530,000	RS JD	Jambi
		1.02.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	57 Laporan	30 Laporan	200,000,000	33 Laporan	220,000,000	34 Laporan	242,000,000	36 Laporan	266,200,000	38 Laporan	292,820,000	171 Laporan	1,526,275,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			asi SKPD	Konsultasi SKPD															
		1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	90 %	90 % 1,200,000,000	90 %	1,500,000,000	90 %	50,000,000	90 %	50,000,000	90 %	50,000,000	90 %	200,000,000	RS JD	Jambi	
		1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	2 unit 1,200,000,000	3 unit	1,500,000,000	2 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	200,000,000	RS JD	Jambi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	98 %	98 %	6,189,000,000	98 %	6,807,900,000	98 %	7,488,690,000	98 %	8,237,559,000	98 %	9,061,314,900	98 %	37,784,463,900	RS JD	Jambi
		1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4,000,000	4 Laporan	4,400,000	4 Laporan	4,840,000	4 Laporan	5,324,000	4 Laporan	5,856,400	20 Laporan	24,420,400	RS JD	Jambi
		1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	4 Laporan	1,150,000,000	4 Laporan	1,265,000,000	4 Laporan	1,391,500,000	4 Laporan	1,530,650,000	4 Laporan	1,683,715,000	20 Laporan	7,020,865,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Disediakan															
		1.02.01 .1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 La por an	5,035,0 00,000	4 La por an	5,538,5 00,000	4 La por an	6,092,3 50,000	4 La por an	6,701,5 85,000	4 La por an	7,371,7 43,500	20 La por an	30,739,1 78,500	RS JD	J a m b i
		1.02.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	1,450,0 00,000	95 %	1,595,0 00,000	95 %	1,754,5 00,000	95 %	1,929,9 50,000	95 %	2,122,9 45,000	95 %	8,852,39 5,000	RS JD	J a m b i

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.01 .1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	48 Unit	400,000,000	50 Unit	440,000,000	50 Unit	484,000,000	50 Unit	532,400,000	52 Unit	585,640,000	250 Unit	2,442,040,000	RS JD	Jambi
		1.02.01 .1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	9 unit	2 Unit	1,050,000,000	2 Unit	1,155,000,000	2 Unit	1,270,500,000	2 Unit	1,397,550,000	2 Unit	1,537,305,000	10 Unit	6,410,355,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi															
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	82 %	83 %	13,000,000,000	84 %	13,500,000,000	84 %	14,000,000,000	85 %	14,500,000,000	86 %	15,000,000,000	86 %	70,000,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	1 Unit	13,000,000,000	1 Unit	13,500,000,000	1 Unit	14,000,000,000	1 Unit	14,500,000,000	1 Unit	15,000,000,000	5 Unit	70,000,000,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Penunjang Pelayanan															
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdiri, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai IKM	Nilai 82	Nilai 83	18,349,336,397	Nilai 84	27,462,585,771	Nilai 84	32,019,888,113	Nilai 85	21,753,403,137	Nilai 86	44,060,599,160	Nilai 422	142,145,812,578	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.02 .1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	95 %	8,335,310,092	95 %	19,247,585,771	95 %	23,609,888,113	95 %	13,288,403,137	95 %	35,480,599,160	95 %	99,961,786,237	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Provinsi																
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio terhadap Jumlah Penduduk minimal 1 : 1000	NA	1 Unit	1,000,000,000	0 Unit	-	1 unit	1,000,000	RS JD	Jambi						
		1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center	NA	15 Unit	100,000,000	15 Unit	110,000,000	15 Unit	121,000,000	15 Unit	133,100,000	15 Unit	146,410,000	75	610,510,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				yang disediakan dan dipelihara															
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	NA	2 Unit	700,000,000	2 Unit	1,200,000,000	1 unit	3,367,427,760	1 unit	1,992,427,760	1 unit	3,367,427,760	7 unit	10,627,283,280	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas	5 unit	4 unit	1,000,000,000	4 unit	1,200,000,000	5 unit	1,500,000,000	10 unit	1,550,000,000	8 unit	1,600,000,000	31 unit	6,850,000,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			fasilitas pelayanan kesehatan	Layanan Kesehatan yang Disediakan															
		1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	NA	1 unit	800.000.000	4 Unit	9.022.585.771	5 Unit	9.159.189.453	1 Unit	945.104.477	5 Unit	19.626.695.500	16 Unit	39.553.575.201	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	NA	25 Unit	185,310,092	25 Unit	220,000,000	25 Unit	230,000,000	25 Unit	240,000,000	25 Unit	250,000,000	125 Unit	1,125,310,092	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan	Jumlah Bahan Habis	58 paket	35 paket	350,000,000	35 paket	385,000,000	38 paket	423,500,000	38 paket	465,850,000	40 paket	512,435,000	186 paket	2,136,785,000	RS JD	Jambi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Kesehatan																
		1.02.02.1.01.2.2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 paket	2 paket	4,100,000,000	2 paket	7,000,000,000	2 paket	8,687,770,900	38 paket	7,828,820,900	38 paket	9,831,220,900	184 paket	37,447,812,700	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan	95 %	95 %	9,214,026,305	95 %	7,405,000,000	95 %	7,540,000,000	95 %	7,595,000,000	95 %	7,710,000,000	95 %	30,552,980,500	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			n, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Tingkat daerah Provinsi															
		1.02.02 .1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	2,300,000,000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	2,300,000,000	RS JD	Jambi						
		1.02.02 .1.02.08	Pengelolaan pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa	4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	160,000,000	20 Dokumen	680,000,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			kesehatan lingkungan	n Pelayanan kesehatan lingkungan		men		men		men		men		men		men			
		1.02.02 .1.02.09	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	110,000,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	125,000,000	4 Dokumen	130,000,000	20 Dokumen	635,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.02 .1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.514.026.305	4 Dokumen	4.550.000.000,-	4 Dokumen	4.550.000.000,-	4 Dokumen	4.600.000.000,-	4 Dokumen	4.650.000.000,-	20 Dokumen	20.864.026.305,-	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			h Kesehatan Jiwa (ODMK)	Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
		1.02.02 .1.02.1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAZPA	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	11 Orang	15 Orang 1,650,000,000	20 Orang 1,815,000,000	24 Orang 1,850,000,000	24 Orang 1,850,000,000	24 Orang 1,900,000,000	107 Orang 9,065,000,000	RS JD	Jambi						
		1.02.02 .1.02.1 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 org	4 org 2.500.000.000,-	- -	- -	- -	- -	4 orang 2.500.000.000,-	RS JD	Jambi						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	NA	97%	550,000,000	97%	550,000,000	97%	600,000,000	97%	600,000,000	97%	600,000,000	97%	2,900,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	NA	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	270,000,000	5 Dokumen	1,310,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan	NA	2 Alat	300,000,000	2 Alat	300,000,000	3 Alat	330,000,000	3 Alat	330,000,000	3 Alat	330,000,000	13 Alat	1,590,000,000	RS JD	Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			si dan Jaringan Internet	Internet yang Tersedia															
		1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi	NA	98 %	250,000,000	98 %	260,000,000	98 %	270,000,000	98 %	270,000,000	98 %	270,000,000	98 %	1,320,000,000	RS JD	Jambi
		1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata	Jumlah Rumah Sakit yang	NA	1 Do ku	250,000,000	1 Do ku	260,000,000	1 Do ku	270,000,000	1 Do ku	270,000,000	1 Do ku	270,000,000	5 Do ku	1,320,000,000	RS JD	Ja



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima pelayanan kesehatan jiwa.

Indikator Kinerja program ini adalah persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terpenuhi yang sesuai dengan pelayanan prima.

#### 7.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Arah Kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses pelayanan.

Indikator Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi sehingga terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana RSJD Provinsi Jambi dalam menunjang operasional pelayanan.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	BB	BB
2	Nilai IKM	82,3	83	84	84	85	86	86

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholders* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum.



**RANCANGAN  
AWAL  
RENJA 2025  
RSJD PROVINSI JAMBI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian indikator kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, menyadari masih terdapat kekurangan - kekurangan di dalam penyampaianya. Oleh sebab itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.

Kepada seluruh Staf RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2024

**DIREKTUR**

**drg. Iwan Hendrawan**

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200604 1 010

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi .....	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD .....	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	44
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi .....	45
3.3. Program dan Kegiatan .....	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	60
BAB V PENUTUP .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renja SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun 2025 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan idiil dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai penjabaran RENSTRA Provinsi Jambi ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perencanaan Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka pendek (1 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Instansi SKPD Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 mempunyai peranan penting, terutama dalam penyusunan Rencana dalam melakukan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 harus dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Renja di Tahun berikutnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp. 40.426.892.341,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 41.549.043.885,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu pengelolaan pelayanan orang dengan masalah kesehatan jiwa sebesar Rp.3.328.362.460,- dari total anggaran Rp. 3.370.604.800,- , sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 47.958.643,- . Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 41.549.043.885,-
2. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 32.864.688.561,-

Realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp. 13.259.279.350,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 13.451.916.996,-.
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 59.137.510.635,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 60.961.815.450,-
3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 31.922.949.539,- (97,13%) dari total anggaran yang dialokasikan kepada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 32.864.688.561,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja serta analisis efisiensi pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Provinsi Jambi**

**Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN										
1	02 01 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	93,41	B	100,21	100,21	B	193,62		
1	02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Kegiatan Dokumen	85	%	-	85	54,49	65,72	85	139,49	1,64

					<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran</b>									
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dok	-	4	37,98	51,11	4	<b>41,98</b>	<b>10,18</b>
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	-	8	73,45	86,09	8	<b>81,45</b>	<b>29,61</b>
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Dok	-	2	57,22	63,86	2	<b>59,22</b>	<b>2,82</b>
1	02	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>92,63</b>	<b>100</b>	<b>90,10</b>	<b>94,69</b>	<b>100</b>	<b>282,73</b>	<b>1,05</b>
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300	Org/bln	92,63	3.300	90,10	94,69	3.300	<b>3482,73</b>	<b>2,418</b>

1	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	95	%	74,02	95	60,69	67,16	95	229,71	13,99
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	450	paket	-	435	-	-	450	450	3,012
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	paket	74,02	40	60,69	67,16	45	179,71	5,42
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	96	%	87,10	96	106,09	89,98	96	289,19	14,34
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	89,08	40	87,94	89,84	40	217,02	9,32
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket	75,12	12	98,38	99,60	13	186,5	2,94
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	33	Laporan	100	30	174,62	83,16	33	307,62	7,95

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>83,89</b>	<b>98</b>	<b>106,62</b>	<b>88,60</b>	<b>98</b>	<b>288,51</b>	<b>43,49</b>
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	0	4	27,83	27,83	4	31,83	52,52
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	77,96	4	92,03	92,03	4	173,99	2,84
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	96,25	4	109,85	88,03	4	210,1	4,21
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Barang Milik daerah Penunjang</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>82,99</b>	<b>95</b>	<b>92,31</b>	<b>96,88</b>	<b>95</b>	<b>270,3</b>	<b>93,86</b>

						<b>Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>									
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50	Unit	66,16	48	94,49	94,49	50	<b>210,65</b>	<b>3,30</b>
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	94,76	2	90,97	98,46	2	<b>187,73</b>	<b>194,26</b>
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>84</b>	<b>%</b>	<b>70,57</b>	<b>83</b>	<b>122,69</b>	<b>99,23</b>	<b>84</b>	<b>277,26</b>	<b>3,22</b>
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang	1	Unit	70,57	1	122,69	99,23	1	<b>194,26</b>	<b>3,09</b>

						pelayanan									
1	02	02				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>84</b>		<b>94,88</b>	<b>83</b>	<b>92,29</b>		<b>84</b>	<b>271,17</b>
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95	%	97,52	95	101,87	96,76	95	294,39	51,42
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	-	-	100	-	99,77	99,77	-	199,77	199,77
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	Unit	100	-	-	-	-	100	6,55



					Kesehatan Lainnya	Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan									
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	95	%	83,99	95	79,72	86,71	95	258,71	2,723263158
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	dok	-	4	67,69	56,91	4	71,69	17,9225
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4	dok	98,67	4	98.16	98,16	4	0	0
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	-	66,06	4	73,40	73,40	-	139,46	139,46

1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	99,95	4	82,58	95,27	-	<b>182,53</b>	<b>182,53</b>
---	----	----	------	----	--	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---------------	---------------

### Analisis efisiensi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	101	59.137.510.635	91
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	98	13.259.276.350	94
		Tingkat Efisiensi RSJD		92,5

Implementasi pengukuran efisiensi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- Tingkat pencapaian diatas 100 % : tidak efisien
- Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
- Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
- Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 masih kurang efisien dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat dalam penyerapan anggaran sebesar 92,5 %. Hal ini akan menjadi perhatian RSJD Provinsi Jambi, agar kedepannya efisiensi anggaran dapat tercapai dengan baik. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

Pada tahun 2022, terdapat dana silpa sebesar Rp. 1.814.266.895,- berikut ditampilkan tabel rincian target dan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 :

**Rekapitulasi Penerimaan**  
**Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>
1	BPJS KES	Rp. 9.069.018.998,-
2	NON BPJS KES	Rp. 3.702.647.006,-
3	PELAYANAN KESEHATAN	Rp. 5.936.785.571,-
4	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 30.983.170,-
5	JASA GIRO	Rp. 63.138.710,-
<b>JUMLAH</b>		Rp. 18.802.573.455,-

**Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Inap**  
**Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>
1	Perawatan	Rp. 937.023.523,-
2	Visite Dokter Spesialis	Rp. 13.270.000,-
3	Visite Dokter Umum	Rp. 6.320.000,-
4	Jasa Evaluasi Psikolog	Rp. 280.000,-
5	Rapid Test	Rp. 2.845.000,-
6	Jasa Sarana	Rp. 39.984.000,-
7	Jasa Pelayanan	Rp. 26.656.000,-
8	Laboratorium	Rp. 11.248.300,-
9	Klaim Covid-19	Rp. 88.146.000,-
10	IPWL Narkoba	Rp. 32.000,-
11	Rehabilitasi Mental / Asesmen	Rp. 5.090.000,-
12	Asuhan Keperawatan	Rp. 3.740.000,-
13	Terapi Aktivitas Individu	Rp. 24.229.500,-
14	Terapi Aktivitas Kelompok	Rp. 10.353.000,-

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
15	Terapi Aktivitas Keluarga	Rp. 2.105.000,-
16	Terapi Aktivitas Insentif	Rp. 930.000,-
17	Karcis / ADM	Rp. 3.200.000,-
18	Obat-obatan	Rp. 51.465.498,-
19	Intervensi Psikososial	Rp. 13.350.000,-
<b>JUMLAH</b>		Rp. 1.240.268.321,-

**Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Jalan  
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi  
Tahun Anggaran 2023**

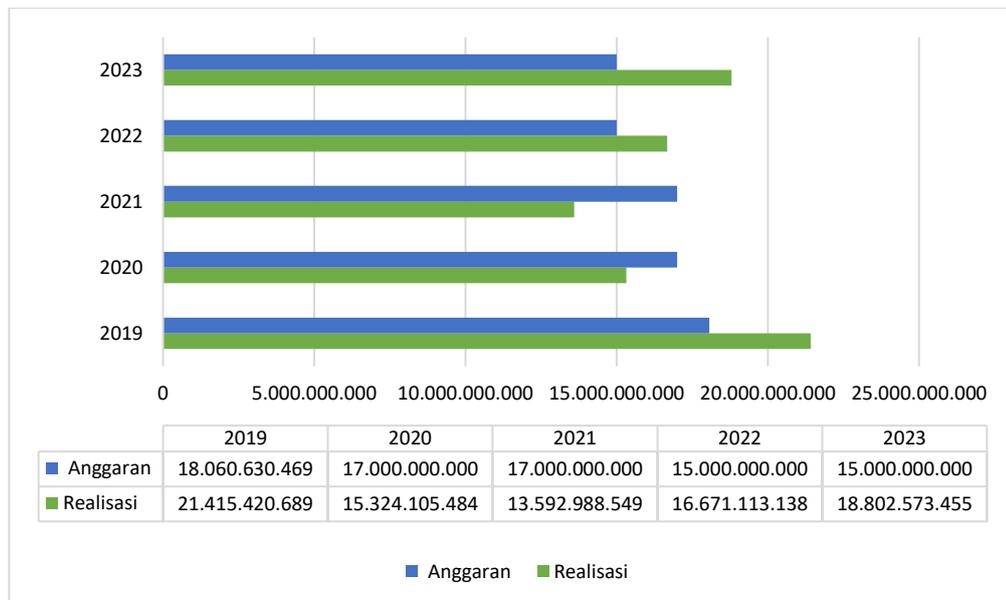
NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
1	Konsultasi Spesialis Jiwa	Rp. 256.250.000,-
2	Konsultasi Spesialis Syaraf	Rp. 126.808.399,-
3	Konsultasi Spesialis Anak	Rp. 440.000,-
4	Konsultasi Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 2.990.000,-
5	Konsultasi Spesialis Akupuntur	Rp. 54.860.000,-
6	Rehab Medik	Rp. 13.590.000,-
7	Konsultasi Dokter Gigi & Mulut	Rp. 67.810.000,-
8	Tindakan Medik MMPI	Rp. 1.195.695.000,-
9	Diagnostik Elektronik (EEG)	Rp. 0,-
10	Laboratorium	Rp. 1.297.799.900,-
11	Konsultasi Psikologi	Rp. 69.915.000,-
12	Fisiotherapi	Rp. 89.910.000,-
13	Terapi Okupasi	Rp. 86.526.000,-
14	Diklat	Rp. 384.860.000,-
15	Visum	Rp. 49.590.000,-
16	Legalisir	Rp. 834.000,-
17	Surat Keterangan Sakit	Rp. 1.756.500,-
18	Radiologi	Rp. 7.635.000,-
19	Karcis IPWL / IGD	Rp. 3.899.200,-
20	Rapid Test Covid-19	Rp. 8.476.000,-

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	
21	Metadhon (PTRM)	Rp.	5.275.000,-
22	Sewa Kantin	Rp.	30.267.768,-
23	Sewa Gedung	Rp.	5.400.000,-
24	Parkir	Rp.	24.632.000,-
25	Tempat Penitipan Anak (TPA)	Rp.	35.558.000,-
26	Obat	Rp.	4.696.517.250,-
<b>JUMLAH</b>		Rp.	4.696.517.250,-

**Tabel Rincian Target dan Realisasi Pendapatan 2023**

No	Rincian Penerimaan	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	Rp. 2.550.000.000,-	Rp. 4.696.517.250,-
2	Pelayanan Rawat Inap	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 1.240.268.321,-
3	BPJS Kesehatan	Rp. 7.250.000.000,-	Rp. 9.069.018.998,-
4	NON BPJS Kes	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 3.702.647.006,-
5	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 150.000.000,-	Rp. 30.983.170,-
6	Jasa Giro	Rp. 50.000.000,-	Rp. 63.138.710,-
<b>TOTAL</b>		Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 18.802.573.455,-

Tahun 2023 persentase pencapaian penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember meningkat di banding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahun:



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

### Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

#### Capaian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% capaian	KRITERIA/ KODE WARNA
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	67,47	Kuning Tua
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	84	84.77	100,91	Hijau Tua

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memiliki dua (2) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai < 100%) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 84.19%.

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat SAKIP	AA	Predikat AKIP Perangkat daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Nilai IKM	100	Nilai IKM	>71	84	84	85	83	84,77	84	85	

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSJD Provinsi Jambi**

Setelah lebih dari 76 tahun Negara Indonesia merdeka, ternyata berbagai permasalahan pada bangsa ini selalu terjadi, tidak hanya permasalahan politik, kedaulatan NKRI, moral bangsa, masalah pendidikan termasuk juga masalah kesehatan.

Masalah kesehatan jiwa masyarakat yang sering terjadi dan menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah adalah maraknya kasus bunuh diri, kejahatan seksual baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa, masalah meningkatnya angka penyalahgunaan NAPZA, masih tingginya angka penderita gangguan mental ringan Depresi 6,1%, Gangguan Mental Emosional 9,8% serta masih tingginya angka penderita gangguan jiwa berat di Indonesia, 6,7 permil rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa skizofrenia/psikosis. angka orang dengan gangguan jiwa berat yang pernah dipasung masih sebesar 14,0% dari jumlah ODGJ yang ada dengan tingkat pasung di pedesaan lebih besar dari perkotaan (17,7% vs 10,7%) (Riskesmas, 2018).

Untuk mengatasi semua permasalahan di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Rencana Strategi tahun 2020-2024, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kuat, hal ini ditandai dengan penduduknya hidup dengan berperilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 dimana upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk :

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
6. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

Saat ini berbagai masalah kesehatan juga sering terjadi dalam wilayah Provinsi Jambi, antara lain : banyaknya warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, belum semua Puskesmas dan RS yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan masih terdapat orang dengan gangguan jiwa berat yang terlantar dan yang di pasung. Berdasarkan data dari hasil Riskesdas 2018, bahwa di Provinsi Jambi bahwa proporsi rumah tangga dengan anggota memiliki gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,6 permil, lebih rendah 0,1 permil bila dibandingkan dengan proporsi secara nasional. Prevalensi penyakit jiwa lainnya adalah:

1. Depresi, 1,8%; Nasional 6,1%.
2. Gangguan Mental Emosional 3,6%; Nasional 9,8%.

Selain permasalahan di atas, beberapa isu lain yang terkait masalah kesehatan jiwa masyarakat adalah adanya stigma buruk

masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan jiwanya.

Berdasarkan data dan informasi di atas, permasalahan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum semua Puskesmas dan RS di kabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.
2. Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJ oleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.
3. Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.
4. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).
5. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
6. Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan *rewards* dan *punishments* yang jelas juga dirasakan masih kurang.
7. Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien.
8. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

Permasalahan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan oleh RSJD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pelaksanaan Mutu Pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar pelayanan optimal
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal karena kurang memadainya peralatan kesehatan dan belum sesuai dengan standar kelas RS)
3. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar sehingga perlu ditingkatkan secara kontinue dan berkesinambungan.
4. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi

**Tabel 2.3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Di RSJD Provinsi Jambi**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwadan non-jiwa	Belum semua Puskesmas dan RS dikabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.	Mutu Pelayanan Kesehatan belum Memadai
	Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJoleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.	
	Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan	

	rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.	
Pemanfaatan sarana prasarana belum optimal	<p>Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).</p> <p>Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.</p>	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai
Rendahnya profesionalisme SDM	Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan rewards dan punishments yang jelas juga dirasakan masih kurang.	Jumlah dan jenis SDM belum memenuhi standar
Sistem Informasi belum optimal	<p>Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien</p> <p>Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan</p>	SIM RS yang belum terintegrasi

yang bermutu yang masih belum optimal.
--

### **2.3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi, dan adanya kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir), sementara masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu, maka permasalahan yang terseleksi sebagai isu strategis adalah sebagai berikut :

### **2.3.3 Isu Strategis yang terkait Mutu Pelayanan**

1. Belum tersedianya sub-spesialistik kesehatan jiwa di Provinsi Jambi.
2. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi, spesialis anak dan spesialis penyakit kulit dan kelamin untuk memenuhi standar pelayanan RS.
3. Jumlah SDM PNS masih sangat terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak dan menambah pembiayaan RS.
4. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
5. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan

kesehatan yang memenuhi standar RS.

6. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

#### **2.3.4 Isu Strategis yang terkait sektor lain/*stakeholders* lain**

1. Adanya program jaminan kesehatan nasional tetapi belum memiliki mekanisme pelayanan maupun pembiayaan yang proporsional terutama bila dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Belum semua Kabupaten/Kota menganggarkan pembiayaan untuk pasien miskin atau terlantar melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terakomodir oleh BPJS. Hingga saat ini, hanya satu kabupaten yang menganggarkan Jamkesda (Kabupaten Tebo).
3. Sistem layanan yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.
4. Masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi yang kemungkinan besar dapat mengancam kesehatan jiwa masyarakat tersebut.
5. Minimnya Peran lintas sektor terkait dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan, peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

#### **2.3.5 Isu Strategis terkait pelanggan**

1. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya.

2. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
3. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor gaya hidup (fisik megah, pelayanan spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih).

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Provinsi Jambi**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>Rp. 67.818.790.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>Rp. 61.467.821.659</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSJD Provinsi Jambi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	85%	Rp. 290.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSJD Provinsi Jambi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	-	-	
1.1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dok	Rp. 135.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 dok	Rp. 40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-	-	

			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	Rp. 115.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 42.820.150.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 38.063.720.975</b>	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 org/bln	Rp. 42.820.150.000	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 org/bln	Rp. 38.063.720.975	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 507.950.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1	Pengadaan pakaian dinas & atributnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	465 paket	Rp. 302.250.000	Pengadaan pakaian dinas & atributnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai	RSJD Provinsi	Jumlah pegawai yang	47 org	Rp. 205.700.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai	RSJD Provinsi	Jumlah pegawai yang	-	-	

	berdasarkan tugas dan fungsi	Jambi	berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			berdasarkan tugas dan fungsi	Jambi	berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	96%	<b>Rp. 907.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	-	-	
4.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Rp. 302.500.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	
4.2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	Rp. 363.000.000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 paket	Rp. 242.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	98%	<b>Rp. 7.488.690.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	98%	<b>Rp. 6.302.505.496</b>	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan	4 laporan	<b>Rp. 4.840.000</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan	-	-	

			Jasa Surat Menyurat					Jasa Surat Menyurat			
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	Rp. 1.391.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	Rp. 1.225.809.496	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	Rp. 6.092.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	Rp. 5.076.696.000	
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>95 %</b>	<b>Rp. 1.754.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>95 %</b>	<b>Rp. 2.101.595.188</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 unit	Rp. 484.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	
6.2	Pemeliharaan/	RSJD	Jumlah	2 unit	Rp.	Pemeliharaan/	RSJD	Jumlah	2 unit	Rp.	

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.270.500.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2.101.595.188	
7	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	84 %	<b>Rp. 14.000.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	85 %	<b>Rp. 15.000.000.000</b>	
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	Rp. 14.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	Rp. 15.000.000.000	
8	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	90 %	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	-	-	
8.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	Rp. 50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>84</b>	<b>Rp. 32.019.888.113</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>84</b>	<b>Rp. 5.862.261.684</b>	

	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	Rp. 23.609.888.113	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	Rp. 3.526.064.610	
1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	0 unit	-	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	-	-	
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 unit	Rp. 3.367.427.760	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	-	
1.3	Pengadaan Sarana di fasilitas	RSJD Provinsi	Jumlah Sarana di	5 unit	Rp. 9.159.189.453	Pengadaan Sarana di fasilitas	RSJD Provinsi	Jumlah Sarana di	-	-	

	layanan kesehatan	Jambi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan			layanan kesehatan	Jambi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan			
1.4	Pengadaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	25 unit	Rp. 230.000.000	Pengadaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	-	-	
1.5	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	5 unit	Rp. 1.500.000.000	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	3 unit	Rp. 1.425.000.000	
1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintance center yang disediakan dan dipelihara	15 unit	Rp. 121.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintance center yang disediakan dan dipelihara	-	-	
1.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Bahan Habis Pakai Lainnya)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	38 paket	Rp. 423.500.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Bahan Habis Pakai Lainnya)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	-	-	
1.8	Pemeliharaan Alat	RSJD	Jumlah Alat	4 unit	Rp. 121.000.000	Pemeliharaan Alat	RSJD	Jumlah Alat	-	-	

	Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Provinsi Jambi	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Provinsi Jambi	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
1.9	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 paket	Rp. 8.687.770.900	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 paket	Rp. 2.101.064.610	
2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	95 %	Rp. 7.540.000.000	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	95 %	Rp. 2.336.197.074	
2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0 dok	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	-	
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	4 dok	Rp. 4.550.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	4 dok	Rp. 2.260.380.000	

			Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAZPA	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	24 dok	Rp. 1.850.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAZPA	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	-	-	
2.4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 orang	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	
2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dok	Rp. 150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dok	Rp. 75.817.074	
2.6	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 orang	Rp. 120.000.000	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	
3	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>97 %</b>	<b>Rp. 600.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1	Pengelolaan Sistem Informasi	RSJD Provinsi	Jumlah Dokumen	1 dok	Rp. 270.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi	RSJD Provinsi	Jumlah Dokumen	-	-	

	Kesehatan	Jambi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Kesehatan	Jambi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
3.2	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	2 alat	Rp. 330.000.000	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	-	-	
4	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>	<b>98 %</b>	<b>Rp. 270.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>	-	-	
4.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 dok	Rp. 270.000.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	-	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Perumusan rencana strategis dilakukan melalui proses/tahapan tentang ketentuan yang menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan rencana strategis yaitu identifikasi isu-isu penting melalui analisa masalah, penentuan visi dan misi, penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program/kegiatan.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merupakan hasil penjabaran visi dan misi dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahunan. Visi dan misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Startegis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Provinsi Jambi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

#### Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi, maka tujuan yang ingin Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dicapai adalah “ ***Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba serta gangguan kesehatan lainnya yang bermutu dan terjangkau dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat provinsi***”

#### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa
2. Masyarakat paham dan peduli serta kesehatan jiwa
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
4. Sistem keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel
5. Jumlah, jenis dan kualitas SDM sesuai standar dan merupakan budaya kerja aparatur
6. Mewujudkan rs jiwa sebagai tempat praktek magang, penelitian oleh institusi Pendidikan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Sasaran** : Tercapainya kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Kegiatan** :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
  
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas & Atributnya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
  2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

### **3.3.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Tujuan : Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Sasaran : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
  2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  3. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
  4. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
  5. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  6. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  7. Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).
  4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi
  - 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
  - 2. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
  - 1. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Provinsi Jambi**

**Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		<b>RSJD Prov Jambi</b>						
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>		<b>RSJD Prov Jambi</b>						
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Predikat AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>B</b>	<b>Rp. 73.236.444.000</b>			<b>BB</b>	<b>Rp. 79.195.863.400</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>Rp. 290.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>85%</b>	<b>Rp. 290.000.000</b>

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 115.000.000	PAD		4 dok	Rp. 115.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Prov Jambi	8 dok	Rp. 135.000.000	PAD		8 dok	Rp. 135.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	RSJD Prov Jambi	2 dok	Rp. 40.000.000	PAD		3 dok	Rp. 40.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 46.702.165.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>Rp. 51.022.381.400</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Prov Jambi	3.300 org/bln	Rp. 46.702.165.000			3.300 org/bln	Rp. 51.022.381.400
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp.528.520.000</b>	<b>PAD</b>		<b>95%</b>	<b>Rp. 551.174.000</b>

3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	RSJD Prov Jambi	470 paket	Rp. 302.250.000	PAD		470 paket	Rp. 302.250.000
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSJD Prov Jambi	48 orang	Rp. 226.270.000	PAD		50 orang	Rp. 248.897.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>96%</b>	<b>Rp. 998.250.000</b>	<b>PAD</b>		<b>96%</b>	<b>Rp. 1.098.075.000</b>
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	42 paket	Rp. 332.750.000	PAD		45 paket	Rp. 366.025.000
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	14 paket	Rp. 399.300.000	PAD		14 paket	Rp. 439.230.000
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSJD Prov Jambi	36 laporan	Rp. 266.200.000	DAU		38 laporan	Rp. 292.820.000
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>Rp. 8.237.559.000</b>	<b>PAD</b>		<b>98%</b>	<b>Rp. 8.237.559.000</b>

		<b>Daerah yang Disediakan</b>							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 5.324.000	PAD		4 laporan	Rp. 5.856.400
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 1.530.650.000	PAD		4 laporan	Rp. 1.683.715.000
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 6.701.585.000	PAD		4 laporan	Rp. 7.371.743.500
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 1.929.950.000</b>	<b>PAD</b>		<b>95%</b>	<b>Rp. 2.122.945.000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	RSJD Prov Jambi	50 unit	Rp. 532.400.000	PAD		52 unit	Rp. 585.640.000

6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSJD Prov Jambi	2 unit	Rp 1.397.550.000	PAD		2 unit	Rp. 1.537.305.000
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>90%</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>90%</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>
7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 50.000.000	PAD		1 unit	Rp. 50.000.000
8	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>Rp. 14.500.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>85%</b>	<b>Rp. 15.000.000.000</b>
8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 14.500.000.000	PAD		1 unit	Rp. 15.000.000.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>85</b>	<b>Rp. 21.753.403.137</b>			<b>86</b>	<b>Rp. 44.060.599.160</b>

	<b>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								
<b>1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana &amp; prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 13.288.403.137</b>	<b>PAD</b>		<b>95%</b>	<b>Rp. 35.480.599.160</b>
1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	RSJD Prov Jambi	0 unit	-	PAD		0 unit	-
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 1.992.427.760	PAD		1 unit	Rp. 3.367.427.760
1.3	Pengadaan Sarana di fasilitas layanan kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 945.104.477	PAD		5 unit	Rp. 19.626.695.500

1.4	Pengadaan Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas Kesehatan	Alat Medik Layanan	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	10 unit	Rp. 1.550.000.000	PAD		8 unit	Rp. 1.600.000.000
1.5	Pengadaan Fasilitas Kesehatan	Prasarana Layanan	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	RSJD Prov Jambi	25 unit	Rp. 240.000.000	PAD		25 unit	Rp. 250.000.000
1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Kalibrasi	dan Alat	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintance center yang disediakan dan dipelihara	RSJD Prov Jambi	15 unit	Rp. 133.100.000	PAD		15 unit	Rp. 146.410.000
1.7	Pengadaan Bahan Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Bahan Habis Pakai Lainnya	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	38 paket	Rp. 465.850.000	PAD		40 paket	Rp. 512.435.000
1.8	Pemeliharaan Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas	Alat Medik Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	RSJD Prov Jambi	4 unit	Rp. 133.100.000	PAD		4 unit	Rp. 146.410.000

	Kesehatan	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar							
1.9	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	38 paket	Rp. 7.828.820.900	PAD		2 paket	Rp. 9.831.220.900
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 7.595.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>95%</b>	<b>Rp. 7.710.000.000</b>
2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 150.000.000	PAD		4 dok	Rp. 160.000.000
2.2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 125.000.000	PAD		4 dok	Rp. 130.000.000
2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 4.600.000.000	PAD		4 dok	Rp. 4.650.000.000

2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	RSJD Prov Jambi	24 orang	Rp. 1.850.000.000	PAD		24 orang	Rp. 1.900.000.000
2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	RSJD Prov Jambi	0 dok	-	PAD		0 dok	-
2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Prov Jambi	0 orang	-	PAD		0 orang	-
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>97%</b>	<b>Rp. 600.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>97%</b>	<b>Rp. 600.000.000</b>
3.1	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	RSJD Prov Jambi	1 dok	Rp. 270.000.000	PAD		1 dok	Rp. 270.000.000
3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSJD Prov Jambi	3 alat	Rp. 330.000.000	PAD		3 alat	Rp. 330.000.000
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>Rp. 270.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>98%</b>	<b>Rp. 270.000.000</b>

	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>							
4.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	RSJD Prov Jambi	1 dok	Rp. 270.000.000	PAD		1 dok	Rp. 270.000.000



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1 PENDANAAN TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terpenuhi</b>	<b>Jambi</b>	<b>Nilai B</b>	<b>68.818.540.000</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun</b>	<b>Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>290.000.000</b>	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	4 dok	115.000.000	PAD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jambi	8 dok	135.000.000	PAD
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jambi	2 dok	40.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah perlengkapannya</b>	<b>Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>46.702.165.000</b>	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	3300 org/bulan	46.702.165.000	DAU
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>528.520.000</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jambi	470 paket	302.250.000	PAD
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Jambi	48 org	226.270.000	PAD
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>96%</b>	<b>998.250.000</b>	
4.1.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan	Jumlah Paket peralatan & perlengkapan	Jambi	42 paket	332.750.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Kantor	kantor yang disediakan				
4.2.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Jambi	14 paket	399.900.000	PAD
4.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jambi	36 laporan	266.200.000	PAD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jambi</b>	<b>90 %</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jambi	1 unit	50.000.000	
5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>8.237.559.000</b>	
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jambi	4 laporan	5.324.000	PAD
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air	Jambi	4 laporan	1.530.650.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		dan listrik yang disediakan				
05.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jambi	4 laporan	6.701.585.000	PAD
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>1.929.950.000</b>	
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jambi	50 unit	532.400.000	PAD
6.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jambi	2 unit	1.397.550.000	PAD
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>Jambi</b>	<b>84%</b>	<b>14.500.000.000</b>	
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan	Jambi	1 unit	14.500.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		pelayanan dan penunjang pelayanan				
II.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN &amp; UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>Jambi</b>	<b>Nilai 84</b>	<b>21.753.403.137</b>	<b>PAD</b>
1.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana &amp; prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>13.288.403.137</b>	<b>PAD</b>
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Jambi	1 unit	1.992.427.760	PAD
1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, alat penunjang medik dan fasilitas kesehatan yang disediakan	Jambi	10 unit	1.550.000.000	PAD
1.3	Pengadaan Sarana di Fasilitas	Jumlah Sarana di Fasilitas	Jambi	1 unit	945.104.477	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Layanan Kesehatan	Layanan Kesehatan yang Disediakan				
1.3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jambi	25 unit	240.000.000	PAD
1.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara	Jambi	15 unit	133.100.000	PAD
1.4.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jambi	38 paket	465.850.000	PAD
1.5	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jambi	4 unit	133.100.000	PAD
1.6.	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Jambi	38 paket	7.828.820.900	PAD
<b>2.</b>	<b>Penyediaan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>7.595.000.000</b>	<b>PAD</b>

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	<b>Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	<b>Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>				
2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jambi	4 dokumen	150.000.000	PAD
2.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jambi	4 dokumen	125.000.000	PAD
2.3	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jambi	4 dokumen	4.600.000.000	PAD
2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Jambi	24 orang	1.850.000.000	PAD
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Jambi</b>	<b>97%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>PAD</b>
	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil	Jambi	1 dokumen	270.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet yang Tersedia	Jambi	3 alat	330.000.000	PAD
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jambi	<b>98%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>PAD</b>
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jambi	1 dokumen	270.000.000	PAD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2025, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran.